

**SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN
PUBLIK YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF TEORI GOOD
GOVERNANCE**
(Studi pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo)

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh:

**RUKYANA MUKHOYAROH
NIM. 135080401111012**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

**SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN
PUBLIK YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF TEORI GOOD
GOVERNANCE**
(Studi pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo)

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Oleh:

RUKYANA MUKHOYAROH
NIM. 135080401111012



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

SKRIPSI

SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN
PUBLIK YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF TEORI GOOD
GOVERNANCE
(Studi pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Ponorogo)

Oleh:
RUKYANA MUKHOYAROH
NIM. 135080401111012

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 17 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No : _____
Tanggal : _____

Dosen Penguji I



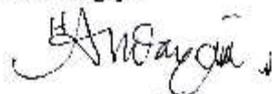
Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198603 1 003
Tanggal : 10 MAY 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Haruko Riniwati, MP
NIP. 19660604 199002 2 001
Tanggal : 10 MAY 2017

Dosen Penguji II



Wahyu Handayani, S.PI, MBA, MP
NIP. 19750310 200601 2 001
Tanggal : 10 MAY 2017

Dosen Pembimbing II



Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal : 10 MAY 2017



Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal : 10 MAY 2017



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya bertanggung jawab dan menyatakan bahwa dalam usulan skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholder* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* (Studi pada Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo)” merupakan benar - benar hasil karya dan pemikiran saya sendiri. Sepanjang penulisan laporan skripsi ini sepengetahuan saya tidak terdapat tulisan, pendapat atau karya orang lain yang pernah diterbitkan oleh instansi atau orang lain kecuali yang tertulis dalam laporan ini yang tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari atau dapat dibuktikan bahwa usulan laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap dan bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi atas perbuatan tersebut yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, 17 April 2017

Penulis

Rukyana Mukhoyaroh

NIM. 135080401111012

RINGKASAN

Rukyana Mukhoyaroh (135080401111012). Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori *Good Governance* (Studi Pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Ponorogo). Pembimbing **Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP** dan **Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP**

Penelitian ini menjelaskan mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper berdasarkan kebijakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus bersifat demokratis berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menjalin sinergitas antar masyarakat supaya bisa mandiri, sehingga akan tercipta sebuah pelayanan yang demokratis.

Fokus penelitian ini adalah proses terjalannya sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance*. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap informan baik lisan maupun wawancara terstruktur, dokumentasi keadaan tempat penelitian dan observasi pada lokasi penelitian serta berdasarkan dokumen berupa jurnal, buku, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga terkait penelitian. Data didapatkan dengan melibatkan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan proses terjalannya sinergitas antar *stakeholders* yang dimulai dari adanya musyawarah masyarakat untuk pembentukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Adanya bisnis yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dengan menjual ikan-ikan lele kepada pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang. Adanya faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah, peran aktif kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, dan keterkaitan pihak kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam pendanaan operasional. Faktor penghambat dalam sinergitas *stakeholders* yaitu perilaku kelompok budidaya ikan lele Desa Coper terhadap pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele dan terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk mengelola 21 Kecamatan dalam pelaku usaha perikanan di Kabupaten Ponorogo sehingga masih kurangnya pemantauan yang diberikan kepada masyarakat di akhir kegiatan.

Masyarakat diharapkan proaktif melalui penggunaan pelayanan publik dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Diharapkan bagi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo lebih meningkatkan kinerjanya yang baik untuk menerapkan nilai *Good Governance* yaitu akuntabilitas berupa tanggung jawab pemantauan perkembangan pada masyarakat budidaya ikan lele Desa Coper.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholder* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* (Studi pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo)”

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga laporan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 17 April 2017

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Sehubungan dengan terselesainya Laporan Skripsi, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan dan bantuan baik secara materil dan moril dalam menyelesaikan Skripsi ini sampai pada tahap akhir. Rasa terimakasih diucapkan kepada:

1. Allah SWT Sang Pemilik Pengetahuan, yang selalu memberikan berkah yang tidak ternilai dan selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi segala kesulitan selama Penelitian berlangsung dan selama proses pengerjaan laporan ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ibunda Umi Masruroh dan Ayahanda Sularto, Saudara Yahdiana Firstin Mubarak terimakasih atas limpahan kasih sayang, do'a, dan dukungan yang telah diberikan
3. Ibu Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Bapak Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, informasi serta waktu dari awal hingga akhir sampai pada penyelesaian laporan ini.
4. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Ibu Wahyu Handayani, S.Pi, MBA, MP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran bagi penelitian saya.
5. Keluarga besar Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan Kelompok Pengolah "Wanita Mulya" Watubonang Ponorogo yang mengizinkan serta menerima penulis dengan baik untuk melaksanakan penelitian dan yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

6. Abang Abdul Rahman, A.Md yang ada di Riau telah memberikan semangat dan motivasi
7. Sahabat - sahabat saya yang sangat saya sayangi Grup Traveller (Rossy, Mitha, Mega, Ilmi, Dewi, Qiftiya, Arica, Ica, Riyanto, Didi, Wahed) terimakasih telah memberi semangat dan dukungan .
8. Keluarga di Malang yang saya banggakan Kos Kertosentono No. 101 telah memberikan semangat
9. Keluarga Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan 2013 dan RKIM (Riset Karya dan Ilmiah Mahasiswa) UB yang telah memberikan dukungan.
10. Serta semua pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi.



DAFTAR ISI

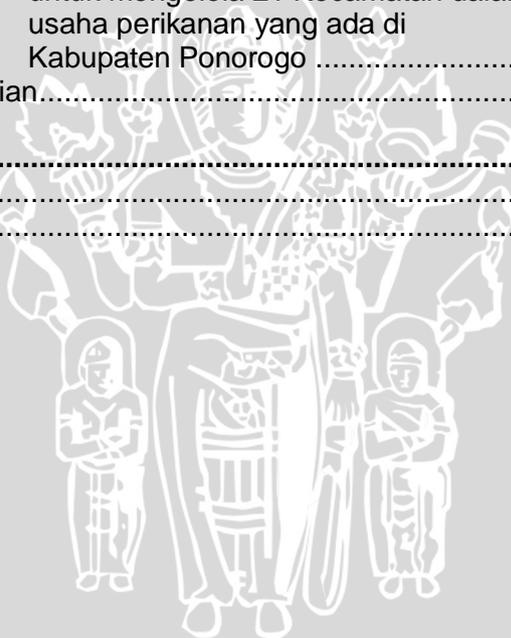
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASH.....	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Pengertian <i>Good Governance</i>	9
2.2.1 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	11
2.3 Pengertian <i>Stakeholders</i>	12
2.4 Pelayanan Publik.....	13
2.5 Sinergitas	15
2.6 Kerangka Pemikiran	16
2.7 Variabel, Indikator, dan Item Indikator	18
3. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Analisis Data	29
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo.....	32
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Ponorogo.....	32
4.1.2 Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Tingkat Pendidikan	34
4.1.3 Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Pekerjaan	35
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo	35
4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Pelayanan Publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	37
4.2.1 Visi dan Misi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	39
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	40
4.2.3 Struktur Organisasi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	42

4.3	Gambaran Umum Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.....	43
4.3.1	Sejarah Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, Kecamatan, Jetis Kabupaten Ponorogo.....	45
4.3.2	Visi dan Misi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.....	46
4.3.3	Struktur Organisasi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo	47
4.4	Kelompok Pengolah “Wanita Mulya”	48
4.5	Penyajian Data Fokus Penelitian	50
4.5.1	Proses Terjalannya Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	50
4.5.1.1	Peran <i>Governance</i> terhadap Proses Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	50
a.	Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	53
4.5.1.2	Peran <i>Civil Society</i> terhadap Proses Terjalannya Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	60
4.5.1.3	Peran <i>Private</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	70
4.5.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	73
4.5.2.1	Faktor Pendukung Sinergitas	73
a.	Dukungan Pemerintah kepada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	73
b.	Peran Aktif Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	76
c.	Keterkaitan Pihak Swasta dalam Pendanaan Operasional Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele.....	78
4.5.2.2	Faktor Penghambat Sinergitas	80
a.	Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele	81
b.	Terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan anggaran untuk mengelola 21 Kecamatan dalam pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo	83
4.6	Analisis Data Fokus Penelitian	84
4.6.1	Proses Terjalannya Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan,	

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	84
4.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori <i>Governance</i> pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	98
4.6.2.1 Faktor Pendukung Sinergitas	98
a. Dukungan Pemerintah melalui Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan, Kabupaten Ponorogo kepada Masyarakat Kelompok Budidaya Ikan Lele	98
b. Peran Aktif Masyarakat Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	99
c. Keterkaitan Pihak Swasta dalam Berbisnis dengan Kelompok Budidaya Ikan Lele	100
4.6.2.2 Faktor Penghambat Sinergitas	101
a. Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele	101
b. Terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan anggaran untuk mengelola 21 Kecamatan dalam pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo	102
4.7 Implikasi Penelitian	105
5. PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

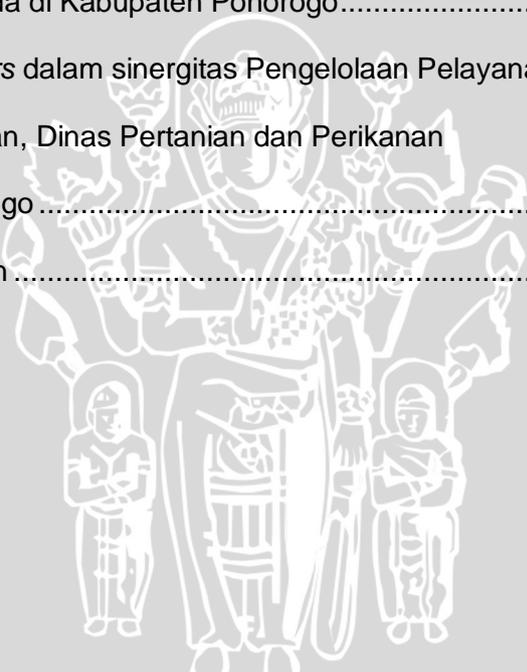
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Variabel, Indikator, dan Item Indikator	19
2. Luas dan Wilayah Kabupaten Ponorogo	33
3. Data Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016	34
4. Data Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016.....	35
5. Kondisi Masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum Adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo ..	52
6. Kondisi Pengelolaan Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	54
7. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan Pelayanan Publik.....	56
8. Awal Mula Berdirinya Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	58
9. Bantuan yang Diberikan Kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	59
10. Peran Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo.....	62
11. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo	64
12. Awal Mula Berdirinya Kelompon Pembudidaya Ikan Lele Desa Coper.....	66
13. Peran Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo	72
14. Dukungan dari Pemerintah Terbentuknya Sinergitas antara <i>stakeholders</i> ..	74
15. Peran Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper.....	77

16. Jumlah Wakil Masyarakat yang Hadir dalam Rapat Perencanaan Pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Lele 2016	78
17. Keterkaitan Pihak Swasta Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pendanaan Operasional Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele	79
18. Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele Desa Coper	81
19. Terbatasnya Petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan Anggaran untuk Mengelola 21 Kecamatan dalam Pelaku Usaha Perikanan yang Ada di Kabupaten Ponorogo.....	83
20. Peran <i>Stakeholders</i> dalam sinergitas Pengelolaan Pelayanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	92
21. Implikasi Penelitain	105



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran Penelitian	17
2. Analisis Data Model Interaktif.....	30
3. Batas-batas Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	33
4. Struktur Organisasi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	42
5. Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	44
6. Struktur Organisasi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	47
7. Olahan Ikan Lele (Kerupuk Lele).....	49
8. Proses Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele pada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	68
9. Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	115
10. Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang.....	115
11. Olahan Kerupuk Ikan Lele dari Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang.....	115
12. Kolam Diatas Tanah Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	116
13. Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian	115
2. Kuesioner Penelitian	117



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik seringkali dalam pelaksanaannya dianggap sebagai pedoman dari kualitas organisasi secara umum. Pelayanan publik mengenai sistem, sumberdaya manusia serta pola pikir yang menjadi latar belakang dalam proses pelayanan itu diberikan kepada masyarakat. Meskipun suatu instansi sudah didirikan cukup lama di suatu daerah, hal tersebut masih kurang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat yang terus menerus mendorong pelayanan yang demokratis belum diberikan perubahan perbaikan aspek pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi penghubung antara negara atau instansi daerah untuk menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan masyarakat, maka perlunya upaya untuk perubahan pelayanan publik sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat yang harus terus dipikirkan agar mendapatkan solusi terbaik.

Perubahan mengenai sistem pelayanan publik merupakan perubahan sistem dalam menyelenggarakan pelayanan dari yang semula berorientasi pada pemerintah akan berubah ke orientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk mengawalinya, pemerintah dengan melalui instansi daerah perlu mendengarkan suara masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan publik yang menjadi faktor utama.

Menurut Rahadian A.H (2009), Latar belakang yang menjadi alasan perlunya reformasi pelayanan publik dapat berkembang sesuai *good governance* di Indonesia ada 3 hal. Pertama perbaikan kinerja pelayanan publik yang berhubungan dengan semua *stakeholders*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku pasar. Upaya perbaikan pelayanan publik apabila berhasil dapat

memperkecil biaya pengeluaran, sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.

Kedua, melalui penyelenggara layanan publik, pemerintah, masyarakat, dan para pelaku pasar saling berinteraksi sehingga pemerintah dengan melalui instansi daerah (dinas) dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Perlunya pelaksanaan perbaikan layanan publik, maka masyarakat akan percaya bahwa pemerintah dengan melalui instansi daerah (dinas) telah benar-benar peduli terhadap masyarakat dan pelaku pasar. Adanya kepercayaan antara pemerintah melalui instansi daerah (dinas) dengan *stakeholders* merupakan persyaratan penting untuk mengembangkan praktik pelayanan publik *good governance*.

Ketiga, nilai-nilai yang menggambarkan praktik *good governance* mampu dikembangkan dengan mudah dan fakta melalui pelayanan publik. Nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keberhasilan pelaksanaan mengenai nilai-nilai tersebut dalam hal pelayanan publik dapat mendorong perbaikan *governance* di Indonesia melalui instansi daerah (dinas). Hubungan yang sinergis antar *stakeholders* akan menciptakan suatu *good governance*. Permasalahan mengenai pengelolaan pelayanan di dinas merupakan permasalahan yang kompleks apabila tidak ditangani dengan baik, bahkan dapat dilakukan secara bersama-sama.

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sebesar 1.371.78 km² menunjukkan bahwasanya memiliki peluang serta tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk memahami arti penting kualitas pelayanan serta perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan menimbulkan potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Berdasarkan tingkat pendidikan

di Kabupaten Ponorogo rata-rata hanya menempuh sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Pendidikan merupakan sarana yang diperlukan sebagai dasar pengembangan pola pikir untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga pendidikan perlu dijelaskan untuk menentukan kualitas sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan. Kabupaten Ponorogo mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 261.383 jiwa. Seseorang yang bekerja memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam pemanfaatan pelayanan dibandingkan seseorang yang tidak bekerja. Penyediaan pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk menjalin sinergitas antara masyarakat dengan masyarakat dengan memberikan rasa saling percaya.

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pernah memiliki penghargaan yaitu juara 3 UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan Perikanan) pada tahun 2015 tingkat Provisnsi Jawa Timur, memiliki sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) untuk BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo untuk jenis benih ikan nila pada tahun 2016 dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta juara 1 UPP Perikanan tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Berbagai penghargaan yang diperoleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwasanya tempat ini memiliki kelebihan tersendiri, meskipun masih belum terkenal luas oleh masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui lebih dalam kegiatan yang ada didalamnya. Perlunya suatu sistem untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah melalui pelayanan publik yang diberikan oleh *Governance* dengan instansi daerah (dinas).

Kabupaten Ponorogo memiliki 130 kelompok budidaya ikan dan berbagai metode budidaya yang diterapkannya. Salah satunya adalah metode budidaya menggunakan sistem kolam diatas tanah atau biasa disebut dengan metode bioflok yang hanya ada pada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dirintis oleh Bapak Komarudin. Kebanyakan masyarakat dalam budidaya menggunakan kolam intensif, semi intensif, dan kolam terpal.

Kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang merupakan salah satu pihak yang membeli ikan-ikan lele di Kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Produk olahan yang di pasarkan berupa kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan. Kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang anggotanya terdiri dari perempuan, hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan kaum perempuan di desa Watubonang.

Sinergitas merupakan adanya suatu hubungan antara dua pihak yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Terciptanya saling berhubungan yang selalu menempatkan *stakeholder* pada posisi yang seimbang yakni sinergitas. Perlunya sinergitas antar *stakeholders* dapat mengatasi permasalahan pengelolaan pelayanan publik dan menciptakan pelayanan publik yang demokratis sesuai dengan *good governance*.

Berbagai keunikan yang dimiliki dari masing-masing *stakeholders* yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, dan kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonag membuat peneliti tertarik dalam pengambilan judul mengenai Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori *Good Governance* (Studi Pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, dan mendeskripsikan:

1. Proses terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti teliti memiliki manfaat antara lain:

1. Secara akademis
 - a. Dijadiikan bahan referensi dalam pengembangan pelayanan publik yang demokratis
 - b. Mengembangkan pola dasar dalam penerapan pelayanan publik yang demokratis
 - c. Menambah wawasan mengenai model kerjasama antara *stakeholders*.
2. Secara praktis
 - a. Dijadikan pola dasar dalam penerapan pelayanan publik yang demokratis mengenai permasalahan yang ada.
 - b. Bahan mempertimbangkan pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk menentukan mekanisme sinergitas yang efektif dan efisien
 - c. Memberikan masukan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk dapat mempraktikkan cara-cara kerjasama yang efektif dan efisien.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Tricahya (2016), dalam penelitiannya dengan judul sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat (studi kasus pantai kondang merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapang, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah model spiral analisis John Creswell dimana terdapat tahap visualisasi dan mempresentasikan data. Bentuk sinergitas antar *stakeholders* yaitu di Kondang Merak terdiri dari 6 lembaga yaitu perum perhutani, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, LSM sahabat alam, *aspinal foundation*, LMDH Sumber Bening, dan kelompok nelayan karya mina. *Stakeholder* belum keseluruhan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dikarenakan minimnya atau terbatasnya pengetahuan mengenai konservasi, minimnya kepercayaan dan komunikasi antar *stakeholder*. Analisis interaksi antara *stakeholder* menggunakan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi serta timbal balik. Faktor pendukung terbentuknya sinergitas antara *stakeholders* yaitu adanya perjanjian antar instansi, dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta kesadaran masyarakat tentang konservasi dan kelestarian lingkungan. Faktor yang menjadi penghambat terbentuknya sinergitas antara *stakeholders* yaitu pemahaman *stakeholders* dalam perjanjian kerjasama serta pemahaman mengenai konservasi terbatas, kurangnya saling percaya dan komunikasi antara *stakeholders*.

Menurut Rahmawati T (2014), dalam penelitiannya dengan judul sinergitas *stakeholders* dalam inovasi daerah (studi pada program seminggu di Kota

Probolinggo (SEMIPRO)) bahwasanya metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program SEMIPRO sudah dilakukan 5 kali hingga akhir tahun 2013. *stakeholder* yang mendominasi terlibat adalah pemerintah, sedangkan swasta dan masyarakat berada sebagai pendukung kegiatan. Pembiayaan yang digunakan dalam program SEMIPRO yaitu berasal dari APBD Kota Probolinggo dan beberapa sumbangan dari swasta meskipun hanya sedikit. Pelaksanaan SEMIPRO ini tidak adanya transparansi dan akuntabilitas masalah keuangan sehingga program ini belum memenuhi salah satu karakteristik prinsip-prinsip *good governance*. Komunikasi merupakan salah satu sinergi yang terjalin dalam program SEMIPRO, namun komunikasi ini masih satu arah hanya kepada Pemerintah saja dan belum terjadi koordinasi melainkan hanya sebatas pengumpulan bantuan dari *stakeholders*.

Menurut Asyhari M (2015), dalam penelitiannya dengan judul sinergitas *stakeholders* dalam program Malang *Green, clean, and save* dalam perpektif *good governance* analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang berisi tahapan *data collective, data condensation, data display* dan *conclusion*. Parameter sinergi interaksi antar *stakeholder* ada 3 yaitu *take and give, saling percaya* dan *menghargai*. Tetapi dari ketiga parameter ini ada satu parameter yang belum terpenuhi yaitu *saling menghargai*, yang disebabkan tidak dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat kurang diikutsertakan dalam perumusan program, dan hanya diikutkan dalam peserta perlombaan. Dilihat berdasarkan prinsip *good governance* sinergitas antara *stakeholders* belum terpenuhi, hanya menggunakan 4 prinsip *good governance* yaitu partisipasi, visi strategis, responsif, efektif dan efisien. Daya tanggap dan visi strategis belum tercapai karena peran masyarakat yang belum

ada yang terlibat dalam perumusan program dan hanya menjadi peserta. Visi misi strategis belum tercapai karena program lingkungan yang seharusnya berkelanjutan dan jangka panjang, tidak dilanjutkan ditahun selanjutnya bahkan tidak ada monitoring setelah program selesai. Hal tersebut dikarenakan kurang komitmen *stakeholders* dalam program dan faktor teknis yaitu kurangnya sumberdaya manusia.

Penelitian-penelitian diatas diketahui bahwasanya dari semua *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terjadi adanya sinergitas. Minimnya pengetahuan, kepercayaan, komunikasi, dan saling menghargai satu sama lain menyebabkan pemerintah menjadi dominan, sedangkan swasta dan masyarakat hanya menjadi pendukung kegiatan.

2.2 Pengertian *Good Governance*

Governance atau biasa disebut tata pemerintahan merupakan penggunaan wewenang politik, ekonomi dan administrasi untuk pengelolaan kegiatan negara. Tata pemerintahan terdiri dari semua mekanisme , proses dan lembaga-lembaga terdiri dari warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengusulkan kepentingan mereka, penggunaan hak, pemenuhan kewajiban dan penjembatani perbedaan diantara mereka (Krina, 2003).

Banyaknya peran yang terlibat dalam suatu usaha namun semuanya tidak ada yang dominan dalam menentukan peran yang lain. *Governance* telah terbukti bahwa didalam masyarakat terdapat sistem dalam pengambilan keputusan namun mereka bekerja dengan tingkatan yang berbeda. Terdapat aturan yang harus diikuti oleh berbagai peran yang memiliki tingkatan pekerjaan berbeda. Aturan yang dimaksud adalah wewenang yang dilaksanakan oleh negara. Konsep *governance* wewenang tidak dilaksanakan dengan sepihak, namun dilakukan dengan kesepakatan dari orang yang berbeda. Maka dari itu,

dengan melibatkan banyak orang dan tidak bekerja sesuai penguasaan pemerintah, maka orang-orang yang berada diluar pemerintahan harus mempunyai keahlian untuk membentuk, mengontrol, serta menaati wewenang yang dibuat bersama.

Perlu diingat bahwasanya *governance* merupakan suatu masalah antar negara, pasar, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan tujuan ekonomi dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun supaya seimbang, masyarakat dibutuhkan dalam kegiatan penerapannya demokrasi, hak asasi manusia, dan menghargai adanya perbedaan agama dan budaya.

Robert Charlick (1994) mengatakan bahwa *good governance* merupakan pengelolaan dari kegiatan publik secara efektif dengan adanya peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk memperkenalkan nilai-nilai kemasyarakatan. Bintoro Tjokromidjojo melihat *good governance* sebagai "suatu bentuk manajemen pembangunan dengan peran pemerintah yang menjadi *agent of change* untuk masyarakat berkembang.

Menurut Effendi (2005), tiga pilar untuk mendukung pelaksanaan *good governance*, yaitu pemerintah, *civil society* (masyarakat), dan pasar atau dunia usaha. Ketiga unsur ini mempunyai hubungan yang kuat dan sinergik dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi. Hubungan antara ketiganya dapat berkembang dengan adanya kepercayaan, transparansi, partisipasi, dan aturan yang jelas dan pasti. Kunci utama dalam menciptakan *good governance* yaitu kepemimpinan yang mempunyai legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Berbagai pandangan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwasanya *good governance* merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara yang bertanggung jawab, efektif dan efisien untuk menjaga sinergitas antara *stakeholders* yaitu negara, swasta, dan masyarakat.

2.2.1 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 yang didalamnya berisikan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif dan efisien terdiri dari:

- a. Profesionalitas, mengembangkan kemampuan serta moral penyelenggara pemerintah supaya dapat memberikan pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan tepat dengan pengeluaran terjangkau.
- b. Akuntabilitas, mengembangkan akuntabilitas bagi pengambil keputusan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan *stakeholders* (masyarakat dan swasta) melalui disediakanya informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang benar dan memadai.
- d. Pelayanan baik, dalam penyelenggaraan pelayan publik terdiri dari proses yang baik, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang harmonis dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi, mengembangkan masyarakat dalam penggunaan hak untuk menyampaikan pendapat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat .
- f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat dengan penggunaan sumberdaya yang tersedia secara bertanggung jawab.
- g. Dapat diterima oleh masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum yang adil untuk semua *stakeholders*, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan norma dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Pengertian *Stakeholders*

Instansi pemerintahan maupun non pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada para pemilik (*shareholders*) hanya pada indikator ekonomi (*economic focused*) tetapi beralih menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*), sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Menurut Solihin (2009), adanya tanggung jawab sosial suatu instansi merupakan salah satu dari tanggung jawab instansi tersebut kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholders* melihat bahwasanya suatu instansi harus melaksanakan kegiatan sosial untuk persyaratan adanya tanggung jawab kepada *stakeholders*.

Menurut Egels N (2004), terdapat dua *stakeholders* dalam pelaksanaan tanggung jawab, yaitu:

- a. *Inside stakeholders*, yaitu orang-orang yang mempunyai kepentingan dan kewajiban kepada sumberdaya instansi dan berada dalam organisasi instansi tersebut, seperti manajer, karyawan, dan para pemegang saham.
- b. *Outside stakeholders*, yaitu orang-orang yang bukan pemilik instansi, bukan pemimpin instansi, dan bukan karyawan tetapi orang-orang yang mempunyai kepentingan kepada instansi dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Stakeholders mempunyai kriteria kepuasan tersendiri terhadap suatu instansi. Penekanan secara berlebihan terhadap kebutuhan suatu kelompok *stakeholders* akan berakibat pada penilaian negatif pada kelangsungan perkembangan instansi tersebut. Maka perlu adanya peningkatan untuk

kelangsungan perkembangan instansi untuk dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan seluruh *stakeholdersnya*.

Stakeholders dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa tantangan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riniwati H (2016), tantangan internal *stakeholders* dapat diatasi dengan *focus group discussin (FGD)* antara lain kekuatan sebagai modal dasar tujuan organisasi, kelemahan yang berkaitan dengan permasalahan MSDM, rencana kerja dan anggaran yang harus disiapkan sebelum kegiatan dilaksanakan, pengembangan usaha yang dilaksanakan setelah proses kegiatan berjalan, pengembangan perusahaan dengan membuat cabang-cabang perusahaan diberbagai tempat, dan rencana strategis merupakan cara yang akan dilakukan dalam jangka panjang.

2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain sehingga dapat menyediakan kepuasan konsumen (Lukman S, 2000). Pelayanan digunakan sebagai cara untuk melayani hasil pekerjaan.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa yang telah disiapkan oleh penyelenggara publik. Publik merupakan masyarakat, negara, dan umum yang memiliki arti bahwasanya pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Parasuraman *et al.*, (1990), Kualitas layanan terdiri dari:

- a. *Tangibles*, terdiri dari fasilitas fisik, perlengkapan, personilnya dan sarana komunikasi. Berkaitan dengan fasilitas fisik, penampilan karyawan, peralatan dan teknologi yang digunakan dalam memberi pelayanan, fasilitas fisik

seperti gedung, ruang tempat layanan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, tempat parkir merupakan salah satu cara dalam kualitas jasa sebab akan memberikan sumbangan bagi konsumen yang memerlukan layanan instansi. Penampilan karyawan yang baik akan memberikan rasa dihargai bagi pelanggan yang dilayani sedang dalam peralatan dan teknologi yang digunakan dalam memberikan layanan akan memberikan kontribusi pada kecepatan dan ketepatan layanan.

- b. *Reliability* (kehandalan), adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan pasti. Pelayanan harus tepat waktu dan dalam spesifikasi yang sama, tanpa kesalahan, kapanpun pelayanan tersebut diberikan.
- c. *Responsiveness* (keikutsertaan), adalah kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Hal ini tercermin pada kecepatan, ketepatan layanan yang diberikan kepada pelanggan, keinginan karyawan untuk membantu para pelanggan (misal: *customer service* memberikan informasi seperti yang diperlukan pelanggan), serta adanya karyawan pada jam-jam sibuk (seperti tersedianya *teller* pada jam-jam sibuk).
- d. *Assurance*, merupakan kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan, bebas dari bahaya, risiko dan keraguan. Kemampuan karyawan dalam menciptakan kepercayaan kepada pelanggan, adanya perasaan aman bagi pelanggan dalam melakukan transaksi, dan pengetahuan serta sopan santun karyawan dalam memberikan layanan kepada konsumen, pengetahuan, kesopanan dan kemampuan karyawan akan menciptakan kepercayaan serta keyakinan terhadap perusahaan.

e. *Empathy*, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. Perhatian atau kepedulian karyawan kepada pelanggan (misal: untuk menemui karyawan senior), kemudahan mendapatkan layanan (berkaitan dengan banyaknya *outlet*, kemudahan mendapatkan informasi melalui telepon). Kepedulian karyawan terhadap masalah yang dihadapinya. Instansi mempunyai objektivitas yaitu: memperlakukan secara sama semua pelanggan. Semua pelanggan berhak untuk memperoleh kemudahan layanan yang sama tanpa didasari apakah mempunyai hubungan khusus dengan karyawan atau tidak.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan publik memiliki banyak aspek. Tetapi untuk mempermudah dalam pelaksanaan penilaian, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik tersebut. Arif (2009) mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang antara lain disebabkan oleh:

1. Struktur organisasi
2. Kemampuan aparat
3. Sistem pelayanan.

2.5 Sinergitas

Sinergi dalam kamus *American Webster Distionary* disebutkan yaitu : *“cooperative interaction among group especially among the acruired subsidiary or merged parts of a coporation that creates an enchanced combined effect”* merupakan interaksi komperatif antar kelompok melalui penggabungan bagian-bagian untuk mendapatkan hasil yang optimal (Lubis, 2009). Sinergi dapat diambil suatu pendekatan yaitu kerja sama untuk memperoleh sesuatu yang maksimal.

Sinergi dapat juga diartikan sebagai mitra kerja yang terdiri dari dua instansi. Menurut Pamudji (1985), bahwasanya sinergi menandakan adanya dua variabel atau lebih yang saling berinteraksi untuk menjalin sebuah hubungan yang sifatnya dinamis untuk memperoleh tujuan bersama. Terdapat tiga hal dalam kerja sama, antara lain adanya dua belah pihak atau lebih, adanya hubungan, dan adanya tujuan bersama.

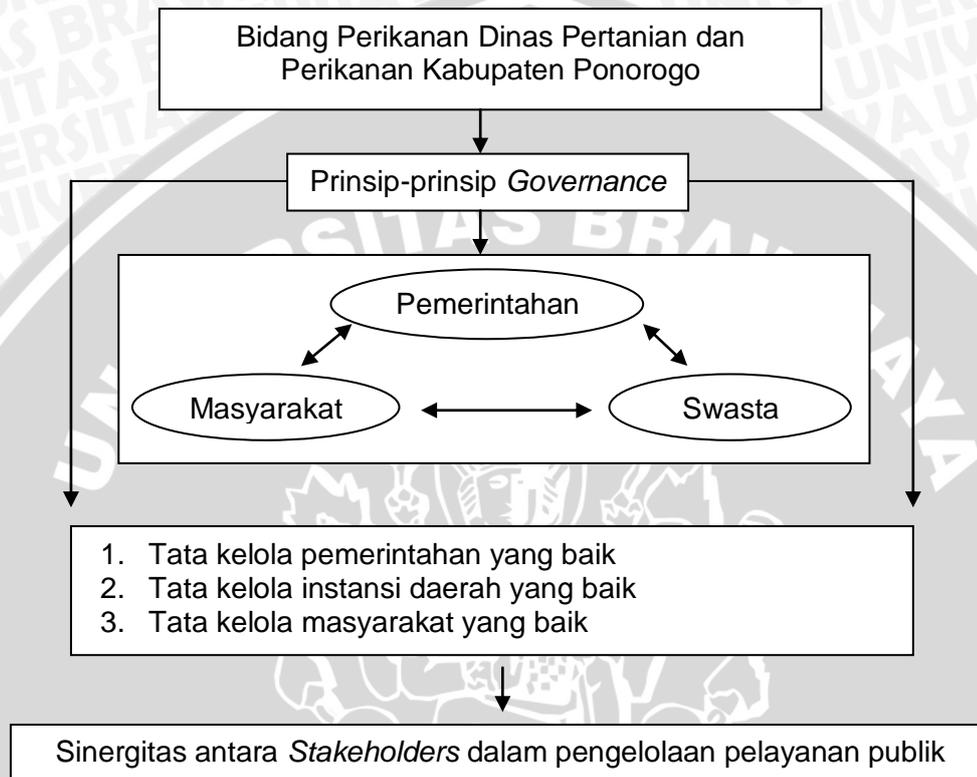
Adanya dua belah pihak berarti menunjukkan suatu kumpulan dari berbagai kepentingan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat menjadikan hubungan atau interaksi untuk tujuan bersama. Terciptanya saling berhubungan yang selalu menempatkan *stakeholders* pada posisi yang seimbang yakni sinergitas.

Organisasi yang terdiri dari berbagai *stakeholders* untuk dapat bersinergi harus berpedoman pada saling membutuhkan dan saling mendukung. Sinergi ini akan ada apabila dua hal atau lebih yang dilaksanakan secara bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang maksimal apabila dilakukan sendiri. Sinergi merupakan suatu keadaan ketika kekuatan dari masing-masing orang digabungkan menjadi satu.

2.6 Kerangka Pemikiran

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu instansi daerah yang memiliki tanggung jawab bagi masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan pelayanan publik. Perlunya perbaikan kinerja pelayanan publik akan dinilai penting bagi *stakeholders*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelayanan publik yang di terapkan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, karena Kabupaten Ponorogo memiliki potensi untuk berkembang yang dituntut untuk dapat meningkatkan

kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan dilakukannya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi daerah untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Adanya interaksi yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka akan mempercepat tercapainya tujuan Nasional yaitu Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Adanya keterlibatan aktif dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat atau *stakeholders* menunjukkan proses sinergitas yang terjalin antara *stakeholders governance*. Sinergitas tersebut akan menghasilkan banyak pilihan dan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh setiap *stakeholders* untuk

mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan pelayanan publik. Sehingga peran *governance* tidak sepenuhnya mendominasi dalam pelayanan masyarakat.

2.7 Variabel, Indikator, dan Item Indikator Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), variabel adalah suatu sifat atau nilai dari diri seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki berbagai tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian variabel memiliki fungsi diantaranya adalah untuk pengujian hipotesis, mempersiapkan metode dalam analisis data, dan mempersiapkan alat dalam pengumpulan data. Dalam penerapannya variabel terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas.

Variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk melakukan observasi atau pengukuran secara hati-hati terhadap suatu objek. Cara pengukuran yang mencakup nama variabel, definisi variabel, hasil ukur (kategori), dan skala pengukuran (Sugiyono, 2015).

Variabel, indikator dan item indikator dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Item Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Item Indikator
Pelayanan publik	Ketepatan waktu (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu pegawai Dinas dalam menyelesaikan pelayanan administrasi - Ketepatan waktu pegawai Dinas dalam pelayanan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang di informasikan kepada masyarakat
	Kemampuan intelektual dan administrasi petugas (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Dinas sudah memiliki skill dan trampil sesuai bidang keahlian untuk mendukung aktivitas pelayanan masyarakat - Pegawai Dinas memberikan proses pelayanan yang lebih cepat
	Kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi lingkungan tempat pelayanan bersih dan rapi - Kondisi lingkungan tempat pelayanan nyaman dan aman
	Ketersediaan fasilitas pendukung layanan (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana dalam proses pelayanan sudah lengkap - Sarana dan Prasarana mendukung waktu proses layanan yang cepat, dan tepat
	Prosedur pelayanan (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelayanan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang di informasikan kepada masyarakat - Prosedur pelayanan memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
	Keadilan pelayanan (Kartikaningdyah, 2011).	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Dinas sudah adil dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat - Tidak adanya diskriminasi antar masyarakat yang membutuhkan pelayanan
Sinergitas Stakeholders	Kerjasama (Riva'i, 2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pasar menjadi lebih luas, organisasi bisa bekerjasama dalam skala yang luas - Kerjasama antara Dinas dengan masyarakat menjadikan akses informasi dapat diperoleh dengan cepat
	Kinerja pemasaran (Riva'i, 2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Stakeholders (Dinas, swasta, dan masyarakat) mampu membuat inovasi produk baru - Stakeholders (Dinas, swasta, dan masyarakat) lebih dikenal banyak kalangan masyarakat
Demokrasi	Kebebasan berpendapat (Suyanto, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan tertulis mengenai pelayanan dari Dinas menghambat kebebasan berpendapat oleh masyarakat - Aturan tertulis mengenai pelayanan dari masyarakat menghambat kebebasan berpendapat oleh Dinas
	Kebebasan dari diskriminasi (BPS Provinsi Aceh, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan tertulis mengenai pelayanan bersifat diskriminasi terhadap kelompok lain - Tindakan atau pernyataan dari Dinas mengenai pelayanan bersifat diskriminasi terhadap kelompok lain
Governance	Corporate governance (Wulandari, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pegawai Dinas semakin meningkat - Pegawai Dinas lebih profesional tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat
	Transparansi (Yenny, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan masyarakat terhadap Dinas semakin meningkat - Masyarakat semakin paham mengenai kegiatan yang ada di Dinas
	Partisipasi (Yenny, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah semakin meningkat - Masyarakat semakin peduli terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh Dinas
	Akuntabilitas (Yenny, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemberian pelayanan sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan - Pembuatan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. METODE PENELITIAN

Menurut Suryana (2010), metode dalam penelitian yaitu prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan penelitian secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan supaya hasil dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Memberikan gambaran yang jelas dan tepat tentang situasi, kondisi, sifat-sifat, dan tanda-tanda yang berhubungan dengan sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menjelaskan mengenai adanya suatu koordinasi dan kerjasama atau sering disebut sinergitas antara *stakeholders* yang termasuk dalam pelayanan publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogoyaitu pemerintah lokal, swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Baktiar C *et all.*, (2014), bahwasanya metode kualitatif merupakan suatu metode melalui pendapat dari berbagai pihak tanpa digunakan suatu perhitungan-perhitungan dengan rumus.

Alasan yang mendasari peneliti dalam penggunaan metode kualitatif yaitu seperti yang disebutkan oleh Moleong (2007), antara lain:

- a. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi objektif mengenai suatu fenomena yang sifatnya terbatas dan dapat dikontrol menggunakan beberapa intervensi. Peneliti akan mencoba mengembangkan definisi dari individu dan kejadian dengan memperhatikan konteks yang relevan.

- b. Menjelaskan penyebab dari fenomena sosial melalui pengukuran yang sifatnya objektif. Tujuan penelitian ini adalah pada upaya untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman yang sifatnya mendalam.
- c. Strategi yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan dokumen, wawancara, dan mencatat data secara intensif.

Menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Baktiar C *et all.*,(2014), metode kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode eksploratoris yaitu suatu metode yang diawali dengan zaman terdahulu dan zaman sekarang sebagai proses awal dan bergerak menuju masa depan dengan melihat semua kemungkinan yang ada.
2. Metode normatif yaitu suatu metode yang dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang, selanjutnya bekerja mundur untuk melihat apakah hal ini dapat dilakukan berdasarkan kendala, sumberdaya, dan teknologi yang telah ada.

Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sebab menggunakan penelitian deskriptif peneliti dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara fakta serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tentang sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu proses awal yang dipilih sebagai tempat penjelasan umum dalam tahap pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti memperoleh gambaran umum atau menyeluruh mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance*. Fokus merupakan batasan-batasan masalah dalam sebuah penelitian metode kualitatif yang terdiri dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan (Akbar F, 2015). Maksudnya adalah peneliti akan melakukan pemilihan data yang terdiri dari berbagai masalah yang ada untuk memastikan kebenaran data yang dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan atau tidak benar. Tetapi bukan berarti data yang tidak benar akan dibuang begitu saja, sebab suatu saat data tersebut akan digunakan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian.

Pembatasan fokus sangat diperlukan dalam penentuan batasan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat menjelaskan batasan serta memperdalam pemahaman. Sehubungan dengan tema sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance*, peneliti kedepannya akan lebih terarah dan mudah dalam pencarian data. Batasan fokus penelitian telah disusun sebagai berikut:

- a. Proses terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- b. Peran *Governance* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- c. Peran *Civil Society* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

d. Peran *Private Sector* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Faktor-faktor yang mempengaruhi Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

- a. Faktor pendukung sinergitas
- b. Faktor penghambat sinergitas

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti sebagai obyek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 26 Desember sampai 20 Januari 2017. Situs penelitian merupakan suatu hal yang menunjukkan dimana kebenarannya peneliti dapat menerima keadaan dari obyek yang diteliti, sehingga keakuratan data yang dibutuhkan bisa diperoleh. Situs dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, ketua Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan ketua kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang.

Pertimbangan yang diperlukan dalam penentuan lokasi dan situs penelitian ada dua hal, yaitu alasan praktis dan alasan metodologi. Alasan praktis digunakan untuk meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang optimal, yaitu efektif, efisien serta ekonomis. Alasan metodologi di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang merupakan salah satu tempat yang

memiliki keanekaragaman daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya daerah seperti yang telah tertera dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pernah memiliki penghargaan yaitu juara 3 UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan) Perikanan pada tahun 2015 tingkat Provisnsi Jawa Timur, memiliki sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) untuk BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo untuk jenis benih ikan nila pada tahun 2016 dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta juara 1 UPP Perikanan tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 2016.

Telah dibuktikan berbagai penghargaan yang diperoleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwasanya tempat ini memiliki kelebihan tersendiri, meskipun masih belum terkenal luas oleh masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui lebih dalam kegiatan yang ada didalamnya. Perlunya suatu sistem untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah melalui pelayanan publik yang diberikan oleh *Governance* dengan instansi daerah (dinas). Sehingga perlu di pahami lebih dalam mengenai pelayanan publik dan bagaimana sinergitas yang terjalin antara *stakeholder* didalamnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari sumbernya yaitu ke lapang, dengan cara mengamati dan mencatat data yang diperoleh.

a. Data Primer

Menurut Hasan ,I (2002), data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari lapangan oleh seseorang yang melakukan suatu penelitian atau yang bersangkutan. Biasanya data primer disebut juga dengan data asli atau data baru.

Data primer merupakan data yang langsung di peroleh dari sumber dengan cara mencatat hasil wawancara dengan pihak terkait, meliputi :

1. Kantor Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
2. Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper
3. Kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang

b. Data Sekunder

Menurut Hasan ,I (2002), data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Biasanya data sekunder didapatkan dari perpustakaan ataupun laporan-laporan terdahulu dan disebut juga data yang telah tersedia.

Penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan atau catatan yang ada pada karyawan di Kantor Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat data bisa didapatkan, yang meliputi kejadian, dokumen, maupun seseorang yang dipilih untuk mendapatkan data-data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- b. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, data-data statistik, laporan-laporan, atau catatan baik yang terdapat pada karyawan di Kantor Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- c. Orang-orang ataupun kelompok yang terlibat dalam proses sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder kemudian diproses dimulai dari tahapan mengidentifikasi dan memilih data, kemudian mengelompokkan data dan mengklasifikasi data dan selanjutnya menganalisis data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu tehnik dalam pengumpulan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Yaitu dengan mengambil informan yang dianggap paling tahu mengenai kondisi lapang sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang saling berinteraksi (Sugiyono, 2015). Selain itu tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan tehnik *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Devers dan Richard (2000) yaitu: *Snowball sampling* digunakan apabila peneliti ingin mengumpulkan data informasi dalam salah satu lokasi, namun peneliti belum tahu siapa yang tepat untuk dipilih, sebab belum mengerti keadaan dan struktur masyarakat di lokasi tersebut, sehingga belum bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti, maka dari itu peneliti dapat melakukan secara langsung datang ke lokasi dan bertanya mengenai informasi yang dibutuhkan kepada siapapun yang pertama kali ditemui. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling* yaitu dengan memilih satu atau dua responden, namun apabila dianggap data yang diberikan dari responden kurang lengkap maka peneliti dapat mencari responden yang dianggap lebih mengerti mengenai kondisi yang ada. Petunjuk informan pertama akan membantu peneliti untuk mendapatkan informan kedua yang memungkinkan memiliki informasi lebih banyak (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak pertama adalah pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai dan pihak yang kedua yaitu terwawancara (interviewee) yang memberikan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Herdiyansah, 2010).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Adapun pihak narasumber yang diwawancarai adalah Ibu Aida ketua Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Bapak Komarudin selaku ketua Kelompok Budidaya Ikan, serta Ibu Harni selaku

ketua kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang. Tujuan dilakukan wawancara yaitu menyajikan informasi saat ini yang didalamnya terdapat konteks mengenai aktivitas, pribadi, perasaan, peristiwa, dan organisasi. Proses wawancara ini dilakukan dengan bantuan dan pembagian kuesioner terstruktur kepada responden.

b. Observasi

Menurut Arikunto (1997), observasi merupakan cara yang efektif dengan melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Observasi bukan sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam satu skala bertingkat. Penentuan variabel yang diamati dan menyusun instrumen pengamatan, peneliti harus ingat bahwa semakin banyak objek diamati, pengamatan semakin sulit dan hasilnya semakin tidak teliti.

Metode observasi dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan, serta pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang.

c. Dokumentasi

Menurut Hasan, I (2002), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dan ditujukan kepada seseorang peneliti, namun diberikan dalam bentuk dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, catatan, ataupun notulen rapat.

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto kegiatan mulai dari mengamati proses setiap kegiatan pada Kantor Bidang perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan, serta pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengolah data menjadi informasi, sehingga sifat data yang telah didapatkan akan mudah dipahami dan bermanfaat guna menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam menentukan penelitian, yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil dari penelitian. Tahap dalam menganalisis data antara lain perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data terdapat tiga alur kegiatan dan dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data (*reduction*)

Reduksi data terjadi terus menerus selama kegiatan dengan metode kualitatif berlangsung sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data mencakup dari pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang dicatat di lapangan.

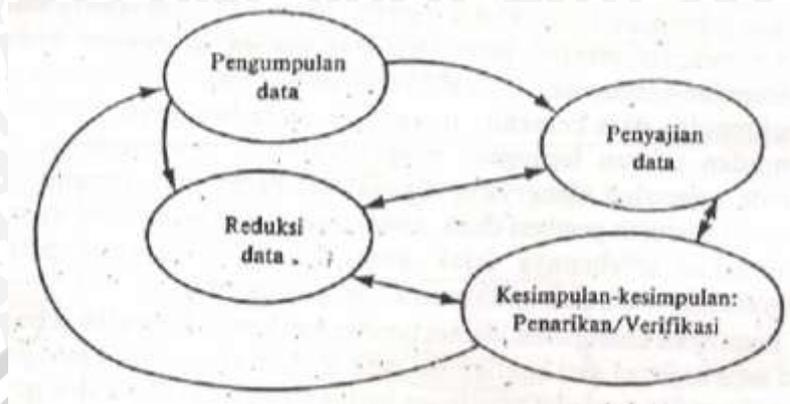
2. Penyajian data (*display*)

Informasi yang tersusun dengan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data yang ada di kehidupan sehari-hari dapat dipahami dengan melakukan analisis atau mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

3. Menarik kesimpulan (*concluding drawing*)

Kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis kualitatif dan mencari makna benda-benda, mencatat penjelasan, serta terjadinya sebab-akibat yang nantinya akan mengambil kesimpulan dengan terbuka.

Alur analisis data model interaktif untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miller dan Huberman (1992)

Gambar diatas menunjukkan permulaan dalam pengumpulan data. Data-data yang terkumpul akan dituangkan menurut kriteria melalui reduksi data. Apabila data yang tereduksi belum sesuai dengan kriteria maka akan diulangi proses reduksi data, tetapi apabila data yang tereduksi sudah sesuai dengan kriteria akan dilanjutkan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pendekatan model interaktif dapat dijelaskan lebih dalam sebagai berikut:

Mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah pertama yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian. Tahap wawancara dilakukan kepada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang.

1. Dokumentasi

Dilaksanakan berupa gambar yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian, sekaligus sebagai bukti validitas dari peneliti. Data berupa

dokumen dikumpulkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang bersumber dari dokumen resmi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang.

2. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data penelitian yang telah dilalui berdasarkan tahap reduksi data. Data dalam bentuk yang sesuai dengan fokus penelitian, untuk mempermudah dalam menganalisis data. Gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, dan pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang. Penyajian data berasal dari tahap reduksi data yang sesuai dengan fokus penelitian.

3. Menarik kesimpulan

Perlunya verifikasi dalam tahap penarikan kesimpulan selama penelitian, sehingga data-data harus diuji kebenarannya. Data yang sudah disajikan akan dianalisis menggunakan deskripsi kualitatif. Data yang dianalisis antara lain terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

4.1.1 Keadaan Geografis dan Topografi

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berjarak sekitar 200 km sebelah barat daya ibu kota propinsi, dan 800 km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ} 7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah $1.371.78 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 21 Kecamatan dari 307 Desa/ Kelurahan. Kabupaten Ponorogo terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Madiun dan Nganjuk
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)

Kabupaten Ponorogo secara topografi berada pada daratan rendah sampai dengan pegunungan. Mayoritas Kabupaten Ponorogo sebesar 79% terletak pada ketinggian kurang dari 500 m diatas permukaan laut, 14,4% terletak antara 500-700 m diatas permukaan laut dan sisanya sebesar 5,9% berada pada ketinggian diatas 700 m. Kabupaten Ponorogo tergolong dalam dataran rendah dengan iklim tropis yang terjadi 2 musim yaitu kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara antara 18° - 31°C .

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut penggunaan disajikan pada

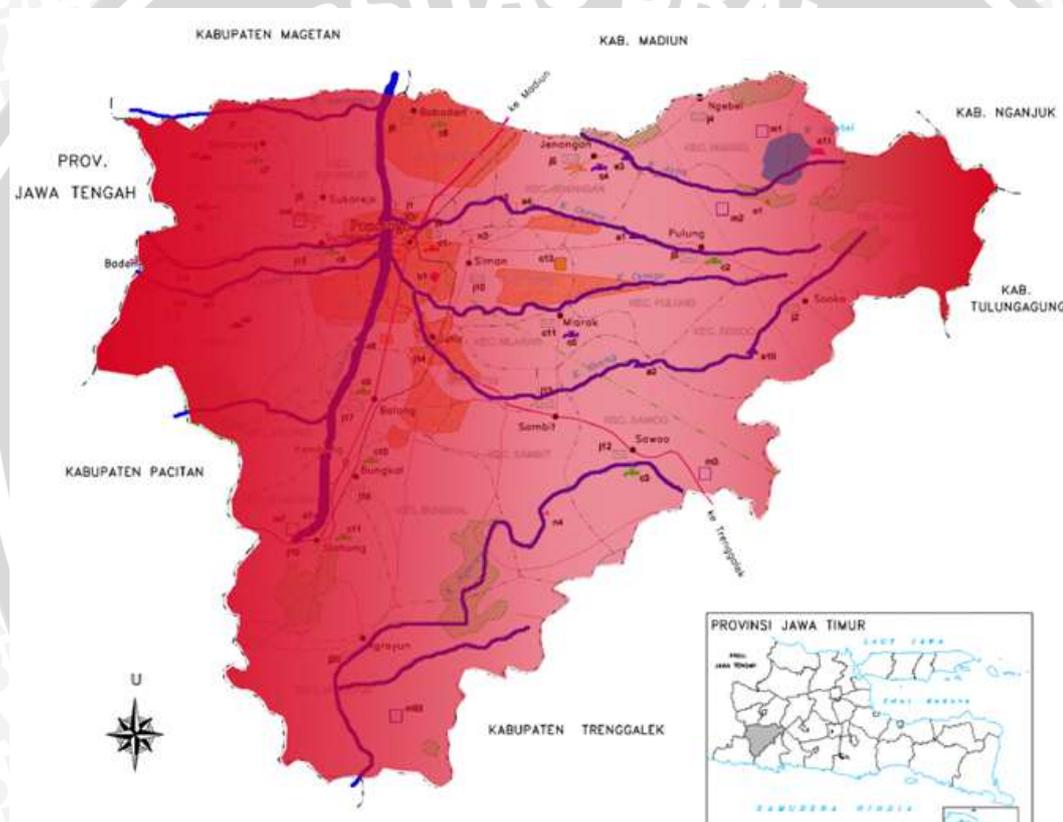
Tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Penggunaan

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	346,38
2	Lahan Bukan Sawah	524,57
3	Pekarangan dan Bangunan	86,18
4	Hutan Negara	382,59
5	Lainnya	32,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2016.

Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Batas-batas Wilayah Kabupaten Ponorogo

Sumber: Google Map, 2016

Dilihat dari besarnya luas wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu seluas 1.371.78 km² menunjukkan Kabupaten Ponorogo memiliki peluang serta tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk memahami arti penting kualitas pelayanan serta perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan

pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan menimbulkan potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk menjalin sinergitas antara masyarakat dengan masyarakat dengan memberikan rasa saling percaya.

4.1.2 Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Ponorogo yaitu terbanyak adalah tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 151.071 orang dan yang paling sedikit adalah tingkat Diploma/ Akademi yaitu sebesar 2.880 orang. Berikut adalah data penduduk Kabupaten Ponorogo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Tingkat pendidikan	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Tidak/ belum pernah sekolah	9.402	8.637
Tidak/ belum tamat SD	65.019	61.243
SD	90.152	60.919
SLTP	55.780	33.027
SMU	34.951	20.323
SMK	19.858	9.447
Diploma/ Akademi	808	2.072
Universitas	11.474	13.331

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2016

Berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo rata-rata hanya menempuh sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Pendidikan merupakan sarana yang diperlukan sebagai dasar pengembangan pola pikir untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga pendidikan perlu dijelaskan untuk menentukan kualitas sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan supaya sesuai dengan SOP (*Standart Operational Procedure*) pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat.

4.1.3 Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Pekerjaan

Penduduk Kabupaten Ponorogo kebanyakan adalah sebagai Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan karena di Kabupaten Ponorogo banyak tanah yang dibuat persawahan, banyak hutan, dan pembudidaya serta pengolahan hasil perikanan. Sehingga sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Ponorogo bersumber dari hasil Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah data penduduk Kabupaten Ponorogo menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016

Jenis pekerjaan	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	149.655	111.728
Industri pengolahan	13.746	11.828
Bangunan	45.009	897
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	24.900	50.987
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	9.264	-
Keuangan dan jasa-jasa	31.485	28.120
Pertambangan dan pengaliran. Listrik, gas dan air minum	309	332

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2016

Jenis pekerjaan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelayanan publik. Kabupaten Ponorogo mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 261.383 jiwa. Seseorang yang bekerja memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam pemanfaatan pelayanan dibandingkan seseorang yang tidak bekerja.

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo

Dalam menjalankan perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo memiliki visi dan misi, yaitu:

VISI “Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius”

Misi:

1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.
2. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.
6. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.

Dalam merumuskan visi dan misi Kabupaten Ponorogo, profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan kebutuhan perencanaan dan tantangan dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. Diarahkan untuk membangun kompetensi, kapasitas yang memiliki daya saing, belajar organisasi yang

didasarkan pada etika moral sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Dengan memprioritaskan profesionalisme dalam perencanaan supaya strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan permasalahan dalam wilayah Kabupaten Ponorogo. Secara umum memiliki tujuan terwujudnya perencananan pembangunan Kabupaten Ponorogo dan terciptanya sinergitas pembangunan Kabupaten Ponorogo yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Pelayanan Publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016, Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yaitu 1.371,78 km² dengan jumlah penduduk sebesar 867.393 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 433.504 jiwa dan penduduk perempuan 433.889 jiwa. Kecamatan sebanyak 21, jumlah desa sebanyak 307, 1.002 lingkungan/ dusun, jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 6.869, jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 2.274 semakin banyak jumlah penduduk seiring bertambahnya tahun, maka semakin banyak pula kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Permasalahan pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan lele oleh Dinas Pertanian dan Perikanan perlu dilakukan secara terpadu supaya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan lele di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Saat ini terdapat 130 Kelompok budidaya ikan di Kabupaten Ponorogo. Beberapa kelompok budidaya ikan sudah beroperasi dan sedikitnya terdapat 30 kelompok budidaya yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah pegawai dan anggaran untuk mengelola dari semua

kelompok budidaya ikan. Selain itu dari 30 kelompok budidaya ikan ini juga kurang aktif dalam pengelolaan pelayanan seperti membuat proposal pengajuan bantuan ke Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Adapun kelompok yang sudah pernah mengajukan proposal bantuan yang belum terealisasi, karena kurang layak beroperasi atau masih belum aktif beroperasi.

Mengatasi permasalahan pengelolaan pelayanan dalam budidaya ikan di Kabupaten Ponorogo, dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi semua program pengelolaan pelayanan dalam budidaya ikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana. Apabila dilihat dari perspektif hukum dalam melakukan pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan mempunyai acuan dan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengacu pada Permendagri No.52 Tahun 2011.

Menurut perspektif teori *Governance*, pengelolaan pelayanan yang baik bukan hanya partisipasi dari masyarakat yang menjadi aspek penting, tetapi adanya keterlibatan dari semua *stakeholders* (Pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan diharapkan untuk membantu dalam permasalahan pengelolaan budidaya ikan di Kabupaten Ponorogo. Keterlibatan *stakeholders* dalam mengelola pelayanan dari Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilakukan dengan cara bersinergi antara satu dengan yang lain.

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pernah memiliki penghargaan yaitu juara 3 UPP (Unit Pelayanan dan Pengembangan) Perikanan pada tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Timur, memiliki sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) untuk BBI (Balai Benih Ikan) di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo untuk jenis benih ikan nila pada tahun 2016 dari KKP (Kementerian Kelautan dan

Perikanan), serta juara 1 UPP Perikanan tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 2016.

Telah dibuktikan berbagai penghargaan yang diperoleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwasanya tempat ini memiliki kelebihan tersendiri, meskipun masih belum terkenal luas oleh masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui lebih dalam kegiatan yang ada didalamnya. Perlunya suatu sistem untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah melalui pelayanan publik yang diberikan oleh *Governance* dengan instansi daerah (dinas). Sehingga perlu di pahami lebih dalam mengenai pelayanan publik dan bagaimana sinergitas yang terjalin antara *stakeholder* didalamnya.

4.2.1 Visi dan Misi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Dalam menjalankan perencanaan pembangunana di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo memiliki visi dan misi yaitu:

Visi bidang perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah “Mewujudkan Sektor Perikanan yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Daerah”

Misi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah:

- a. Kedaulatan yakni mewujudkan Perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perikanan
- b. Keberlanjutan yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (*sustainability*)

- c. Kesejahteraan yakni mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan

Dalam merumuskan visi dan misi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan kebutuhan perencanaan dan tantangan dengan menerapkan prinsip *Good Governance*. diarahkan untuk membangun kompetensi, kapasitas yang memiliki daya saing, belajar organisasi yang didasarkan pada etika moral sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Dengan memprioritaskan profesionalisme dalam perencanaan supaya strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan permasalahan dalam wilayah Kabupaten Ponorogo. Secara umum memiliki tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo dan terciptanya sinergitas pembangunan Kabupaten Ponorogo yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yaitu:

- a. Seksi perbenihan dan budidaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan.
- b. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan

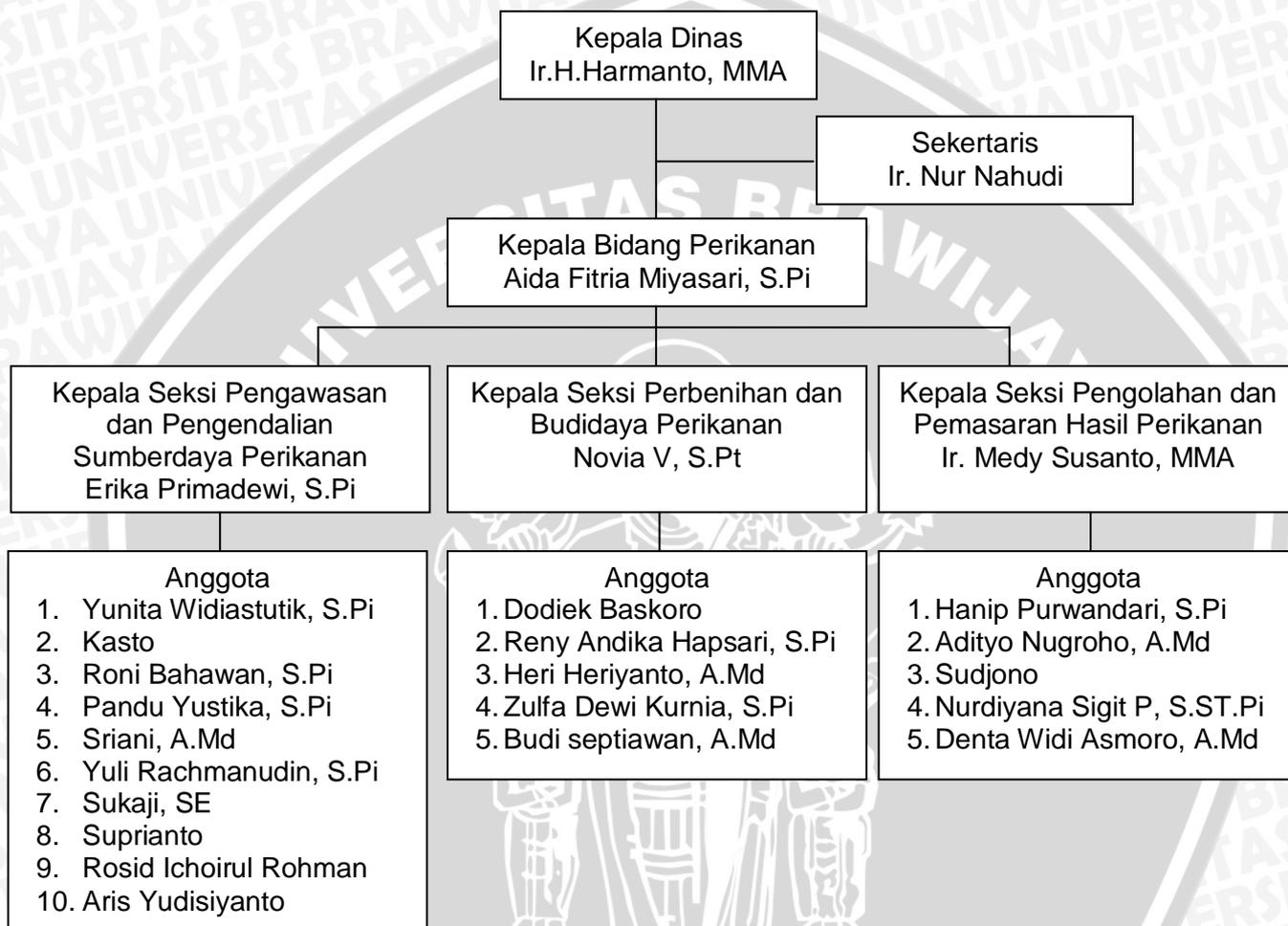
teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Konsep *good governance* perlu ditransformasikan ke dalam kinerja suatu organisasi. Misalnya dalam penelitian ini terkait dengan pelayanan publik kewenangan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, maka nilai atau atribut *good governance* perlu ditransformasikan ke dalam proses implementasi pelayanan publik guna mencapai keberhasilan yang berarti (signifikan). Berbicara tentang penerapan *good governance* pada sektor publik tidak lepas dari tujuan, pokok dan fungsi sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat.



4.2.3 Struktur Organisasi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Struktur organisasi pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 4. Struktur Organisasi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Gambar 4 terlihat bahwa struktur organisasi dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi kelompok jabatan fungsional, sekertaris, seksi perbenihan dan budidaya perikanan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Adapun tugas pokok dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah Seksi perbenihan dan budidaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Perkembangan informasi dapat mempercepat perubahan organisasi dalam suatu daerah. Perubahan terhadap sumberdaya manusia 1 persen saja dapat merubah struktur organisasi. Selain perubahan yang disebabkan faktor teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Praktik manajemen yang sudah lama akan mengakibatkan rentan terhadap perubahan organisasi untuk mencapai efisiensi. Perubahan kondisi pasar dan pelaksanaan *Good Governance* dapat mempengaruhi struktur perkembangan organisasi. Maka perlu menganalisis manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang strategis. Yaitu meyakinkan bahwa pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap organisasi memiliki informasi dan pengetahuan yang relevan, mengambil keputusan yang baik dan terpercaya.

4.3 Gambaran Umum Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Kelompok budidaya ikan lele berada di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah tempat pengelolaan pelayanan budidaya ikan. Kelompok ini mulai berjalan semenjak tahun 2010 namun masih

usaha sendiri, mulai membentuk kelompok pada tahun 2016 dan melayani pengelolaan budidaya ikan lele dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Pembentukan kelompok budidaya ikan di bentuk dengan musyawarah yang di sepakati oleh masyarakat, kepala desa, dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dalam pengelolaannya menggunakan kolam intensif dan sistem kolam diatas tanah. Sekarang ini kolamnya terdiri dari 8 kolam intensif dan 8 kolam menggunakan sistem kolam diatas tanah. Dokumentasi mengenai kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Perlu diketahui bahwasanya di Kabupaten Ponorogo cara budidaya menggunakan sistem kolam diatas tanah hanya ada pada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yang dirintis oleh Bapak Komarudin. Kebanyakan masyarakat dalam budidaya menggunakan kolam intensif, semi intensif, dan kolam terpal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tempat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper mengenai cara pengelolaan pelayanan dari Pemerintah.

4.3.1 Sejarah Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Awal mula berdirinya kelompok budidaya lele adalah masyarakat sudah hobi dalam budidaya lele dan sudah memiliki kolam sendiri dirumahnya. Kemudian mendengar ada program yang diadakan dari Dinas Pertanian dan Perikanan yang namanya “Budidaya Lele Ponorogo” pada tahun 2016, akhirnya masyarakat musyawarah bersama kepala desa untuk membentuk kelompok budidaya ikan lele. Akhirnya keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut yaitu untuk membentuk kelompok budidaya ikan lele dan mengelola budidaya ikan lele.

Masyarakat bergabung membentuk kelompok budidaya ikan lele karena untuk menguatkan budidayanya supaya apabila terjadi permasalahan mengenai budidaya atau pelayanan dapat diceritakan dan dikoordinasikan bersama-sama dengan Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mendapatkan solusi. Usulan ini mendapat respon baik oleh masyarakat dan pemerintahan setempat, khususnya Desa Coper. Sebelumnya masyarakat harus membuat proposal pengajuan bantuan ke Dinas Pertanian dan Perikanan, selanjutnya dari pihak Dinas melakukan survey lokasi untuk melihat ketepatan apakah diberikan besarnya bantuan, dan apabila sudah disetujui dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan maka bantuan akan turun ke kelompok budidaya lele selama 3 bulan. Sehingga masyarakat mendapat bantuan dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada bulan September 2016.

Bantuan yang diberikan tidak langsung semua diberikan dalam 1 waktu, namun bantuan akan turun dengan bergantian selama 3-7 hari. Bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yaitu berupa kolam intensif 8 kolam, pakan ikan 24 sak, dimana tiap 1 kolam mendapatkan 4

sak pakan, bibit ikan lele sebanyak 1500 ekor, memandu dalam proses budidaya ikan lele yang baik dan benar

4.3.2 Visi dan Misi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

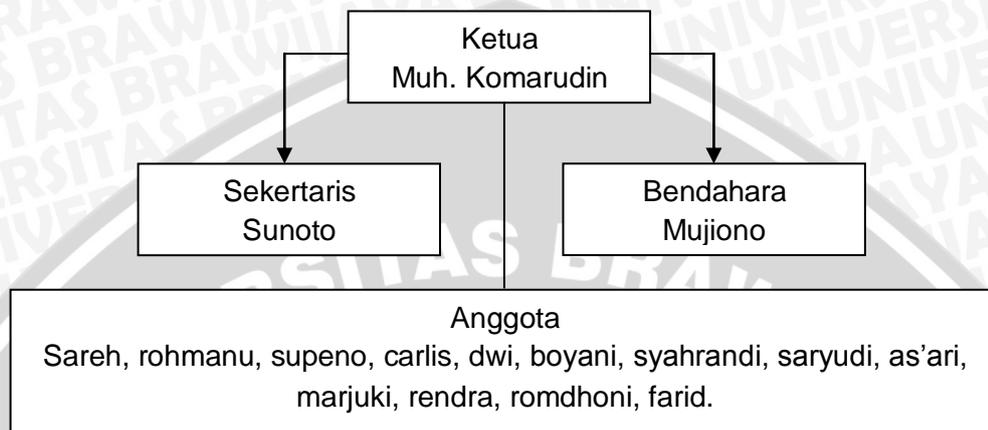
Kelompok budidaya ikan lele Desa Coper memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

Visi “Menjadi peternak yang konsisten, dan memberikan kualitas ikan yang jauh lebih berkualitas”. Misi Budidaya ikan lele dengan gaya petani modern, selalu berusaha meneliti dan konsisten dalam merawat dan mengembangkan ikan, memberi makan ikan dengan gizi dan nutrisi sesuai standar peternakan.

Merumuskan visi dan misi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper, profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan kebutuhan perencanaan dan tantangan dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, diarahkan untuk membangun kompetensi, kapasitas yang memiliki daya saing yang didasarkan pada etika moral sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Dengan memprioritaskan profesionalisme dalam perencanaan supaya strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan permasalahan dalam Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper supaya terciptanya sinergitas pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

4.3.3 Struktur Organisasi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Struktur organisasi kelompok budidaya ikan lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Gambar 6 yaitu mengenai struktur organisasi kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Terlihat bahwasanya organisasi yang ada di kelompok budidaya ikan lele desa Coper sangat sederhana, yaitu terdapat ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota yang berjumlah 13 (tiga belas orang). Jadi secara keseluruhan jumlah anggota yang ada pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper terdiri dari 16 orang yang berasal dari Desa Coper sendiri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dibantu oleh Sekertaris memiliki tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi, pelaporan dan umum, keaparaturan, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. Fungsi sekertaris yaitu Perumusan kebijakan teknis administrasi keaparaturan, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; ii) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, keaparaturan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;

iii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; iv) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan. Tugas bagian keuangan adalah Bertanggung jawab atas keuangan dan pemakaian uang pabrik merencanakan dan mengatur pengeluaran uang untuk pembelian bahan baku, memeriksa jurnal-jurnal harian dan laporan administrasi dan keuangan dan mempersiapkan proyeksi anggaran dan arus kas. Tugas dari anggota antara lain menjaga keamanan lingkungan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, mengelola asset-aset khususnya kolam, mengatur kebersihan lingkungan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, dan mengatur kebutuhan rumah tangga kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dan anggota selama dan diluar jam kerja.

Perubahan terhadap sumberdaya manusia 1 persen saja dapat merubah struktur organisasi. Selain perubahan yang disebabkan faktor teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Praktik manajemen yang sudah lama akan mengakibatkan rentan terhadap perubahan organisasi untuk mencapai efisiensi. Perubahan kondisi pasar dan pelaksanaan *Good Governance* dapat mempengaruhi struktur perkembangan organisasi. Maka perlu menganalisis manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang strategis. Yaitu meyakinkan bahwa pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap organisasi memiliki informasi dan pengetahuan yang relevan, mengambil keputusan yang baik dan terpercaya pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.

4.4 Kelompok Pengolah “Wanita Mulya”

Kelompok pengolah “Wanita Mulya” merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari adanya kelompok budidaya ikan lele desa Coper. Kelompok ini merupakan pendukung dari berjalannya kelompok budidaya ikan

lele desa Coper. Bahkan sering kelompok pengolah “Wanita Mulya” menjadi aktor penting yang sangat dibutuhkan oleh pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sebagai pembeli ikan-ikan lele. Kelompok pengolah “Wanita Mulya” berjumlah 15 orang. Kehadiran pengolah “Wanita Mulya” untuk membeli ikan-ikan lele yang dijual oleh pihak kelompok budidaya ikan lele desa Coper adalah sejak kelompok budidaya ikan mulai dibentuk yaitu tahun 2016. Dokumentasi mengenai olahan ikan lele berupa kerupuk lele dari kelompok pengolah “Wanita Mulya” Watubonang dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Olahan Ikan Lele (Krupuk Lele)

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang merupakan salah satu pihak yang membeli ikan-ikan lele di Kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk dijadikan produk olahan berupa kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele. Pihak swasta sudah percaya terhadap kualitas ikan lele yang dibeli dari kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sehingga sudah menjadi langganan untuk melakukan bisnis antar *stakeholders*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tempat kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam pengelolaan pelayanan serta hubungan yang terjalin antara *stakeholders* yaitu antara Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.

4.5 Penyajian Data Fokus Penelitian

4.5.1 Proses Terjalannya Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Dalam pengelolaan pelayanan publik khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo dibutuhkan keterlibatan dari seluruh elemen-elemen yang ada didalam masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud adalah terjalannya sinergitas antara *Stakeholders Governance* yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik, sehingga tercipta sebuah sistem pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dapat berjalan dengan baik dan tertata rapi, serta interaksi antar sub sistem yang ada didalamnya saling mendukung.

Penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan adalah adanya sinergitas yang terjalin dari *stakeholders* yaitu pemerintah dan swasta, sedangkan dari masyarakat terdapat beberapa faktor yang membuat tidak sinergi antara satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah dan swasta saling mendukung tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Didapatkan sebuah sinergitas yang terlihat dari peran *stakeholders* yaitu Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo, serta tidak terjadi sinergi antara masyarakat dengan pemerintah di akhir dalam pengelolaan pelayanan sebagai berikut:

4.5.1.1 Peran *Governance* terhadap Proses Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Governance atau Pemerintah adalah suatu lembaga beserta aparaturnya yang bertanggung jawab untuk melayani dan melaksanakan mandat dari rakyat di wilayahnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *Governance* adalah pihak Pemerintah yang berperan dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo. Adapun pihak *Governance* yang didapat dalam penelitian

ini adalah Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Penulis akan menyajikan data yang didapat dari pihak pemerintah yaitu Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Berikut penjelasan dari pihak terkait proses terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaen Ponorogo.

a. Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan masalah perikanan. Adapun tugas pokok dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah Seksi perbenihan dan budidaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan, seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seksi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo, didalam Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo terdapat bidang perbenihan dan budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Keberadaan bidang perikanan dikarenakan kondisi masyarakat yang masih kurang perhatian terhadap perikanan. Masih sedikitnya yang mengerti tentang

perikanan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aida selaku ketua Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Bapak Komarudin selaku ketua kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, dan Ibu Harni selaku ketua kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 5.

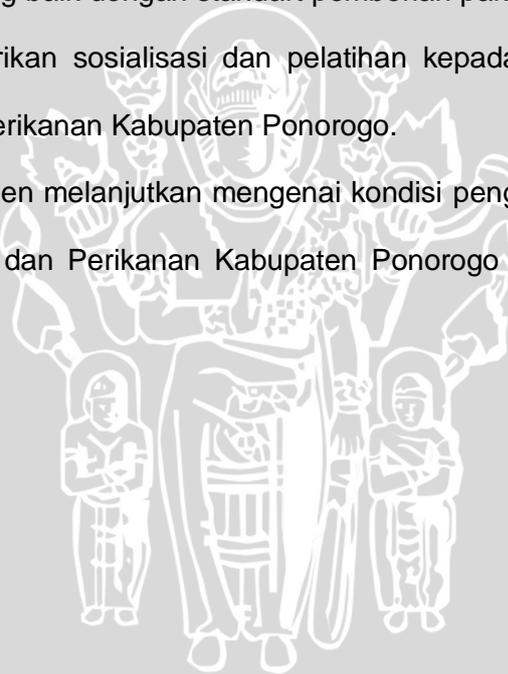
Tabel 5. Kondisi Masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum Adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Kondisi Masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum Adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Dulu masyarakat berpikir budidaya itu untungnya dikit mbak dan mereka juga belum banyak yang bisa cara budidaya yang benar jadi budidaya alakadarnya saja, tapi sekarang setelah kita adakan sosialisasi dan pelatihan sudah bisa mbak (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.12 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya kondisi masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo masih belum baik. Masyarakat masih kurang informasi dalam bidang perikanan sehingga masyarakat kurang aktif dalam pengelolaan pelayanan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo mengakibatkan banyaknya pengangguran yang dialami masyarakat.
Bapak Komarudin	<i>Ya kami sedikit bingung mbak kalau mau tanya-tanya cara budidaya ikan atau pada saat ikan terserang penyakit, wah itu bisa jadi semua ikan mati dan kita rugi mbak, ya akhirnya kita coba nyari sendiri caranya (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.10 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Susah mbak kalau mau cari informasi yang menyangkut perikanan, entah itu budidaya atau pengolahan ikan.kita juga duku gak aktif kayak gini. Dulu kita masih nganggur-banyak waktu terbuang. Kalau sekarang kita jadi punya penghasilan tambahan lah mbak dikit-dikit (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.00 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo masih belum baik. Masyarakat masih kurang informasi dalam bidang perikanan sehingga masyarakat kurang aktif dalam pengelolaan

pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang dialami masyarakat. Namun sekarang masyarakat Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan pelayanan publik dalam hal perikanan sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengelolaan pelayanan publik bagi kelangsungan kehidupan mereka. Masyarakat yang dahulu menggunakan paradigma lama, yaitu budidaya ikan dengan sebisanya saja tanpa melihat berapa padat tebar ikan yang sesuai untuk kolam dan pakan yang diberikan setiap harinya, sekarang sudah mengerti tata cara budidaya ikan yang baik dengan standart pemberian pakan dan padat tebar di kolam setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Kemudian responden melanjutkan mengenai kondisi pengelolaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6. Kondisi Pengelolaan Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Kondisi Pengelolaan Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Berjalan dengan baik dan berjenjang, sarana dan prasarana sudah mulai diberikan kepada masyarakat. Namun memang masih ada beberapa dari masyarakat yang belum mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Ada 30 kelompok dari 130 kelompok yang belum mendapatkan bantuan, ya karena memang mereka masih belum layak mbak (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.17 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya kondisi pengelolaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan berjenjang. Bantuan-bantuan semakin banyak dan informasi yang diberikan selalu tepat waktu sehingga masyarakat bisa turut aktif dalam program-program yang dilaksanakan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Bapak Komarudin	<i>Mereka memberikan informasi kaya bantuan-bantuan itu tepat waktu. Terus juga disiplin dalam arti begini, mereka akan memberikan kita bantuan itu setelah kita mengajukan proposal dan harus mengikuti prosedur dari dinas mbak (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.13 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	meskipun terdapat beberapa masarakat yang belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sebanyak 30 kelompok dari 130 kelompok pembudidaya ikan. Hal ini disebabkan karena kelompok masih belum layak mendapatkan bantuan tersebut.
Ibu Harni	<i>Dinas selalu up to date mbk jadi kita itu bisa tahu semua kegiatan yang mungkin akan dilakukan di Dinas itu apa aja. Terus saya juga melihat kalau sekarang ini kan banyak program pemberian bantuan-bantuan gitu sehingga masyarakat kan jadi aktif gitu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.04 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasanya semakin lama pengelolaan pelayanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo semakin membaik dan berjenjang meskipun terdapat sedikit dari masyarakat yang belum terkelola dengan baik. Berjenjang maksudnya yaitu masyarakat dalam mengusulkan bantuan ke pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten dapat melalui 3 cara antara lain:

- a. Masyarakat bisa langsung ke penyuluh perikanan kemudian penyuluh perikanan akan menyampaikan ke bidang perikanan. Masyarakat dapat

memberikan surat atau langsung memberikan pemberitahuan dengan lisan ke penyuluh.

- b. Masyarakat memberikan surat ijin ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- c. Masyarakat memberikan surat ijin ke Kepala Desa setempat kemudian dilanjutkan ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Bantuan-bantuan dan informasi yang diberikan semakin banyak dan selalu tepat waktu sehingga masyarakat bisa turut aktif dalam program-program yang dilaksanakan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sebanyak 30 kelompok dari 130 kelompok pembudidaya ikan. Hal ini disebabkan karena kelompok masih belum layak mendapatkan bantuan tersebut setelah dilakukan survey dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Peran Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam proses terjalannya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan tidak hanya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, namun peran Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang intinya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pelayanan atau penyediaan benih bermutu melalui BBI (Balai Benih Ikan), konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan. Namun didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo masih memiliki beberapa kendala.

Berbagai kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan pelayanan publik, dijelaskan oleh Ibu Aida pada Tabel 7.

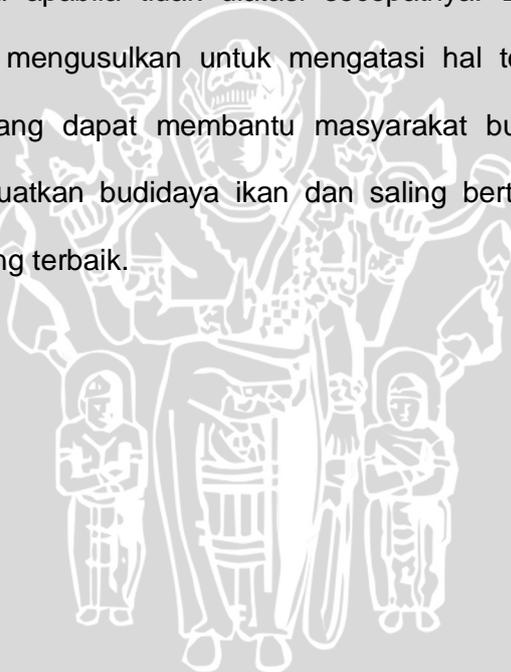
Tabel 7. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan Pelayanan Publik

Responden	Informasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam Pengelolaan Pelayanan Publik	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>terbatasnya personil untuk memback up 21 kecamatan yang ada di Ponorogo dan terbatasnya anggaran untuk mensupport pelaku usaha perikanan dalam peningkatan produksi dan pendapatannya (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo setiap <i>stakeholders</i> berbeda. Hambatan dari Pemerintah yaitu karena terbatasnya pegawai yang ada sehingga sulit untuk mengelola 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, serta terbatasnya anggaran untuk mendukung usaha perikanan.
Bapak Komarudin	<i>masyarakat belum terlalu paham cara budidaya dengan menggunakan kolam diatas tanah mbak, ya jadi kita perlu belajar bersama dan perlu bimbingan. Yang mengetahui cara budidaya dengan kolam diatas tanah ya hanya beberapa orang saja (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.17 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	Hambatan dari Masyarakat adalah sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah. Dan akhirnya mereka belajar sendiri.
Ibu Harni	<i>Produksi terkait cuaca, pemasaran masih terbatas sehingga menghambat produksi tidak memperoleh hasil yang banyak,tapi kemaren sudah dibantu dari Dinas mbak mereka memberikan kita outlet penjualan untuk produk kami. ketiga produksi juga mengenai alat kita masih manual (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.09 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	Hambatan dai pihak swasta yaitu terkait cuaca, karena dalam produksinya memerlukan cahaya matahari untuk menjemur kerupuk ikan. Serta alat yang digunakan masih manual. Namun dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo telah memberikan saran tempat penjualan yaitu di pusat oleh-oleh.

Dari uraian diatas bahwasanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk menjalin sinergitas, masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya adalah terbatasnya pegawai untuk menkoordinasi 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo dari 130 pembudidaya ikan dan terbatasnya anggaran dana untuk proses keberlangsungan usaha yang

digunakan untuk mendukung dalam usaha perikanan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu alternatif dalam pengelolaan pelayanan publik masalah perikanan yang ada di masyarakat berawal ketika masyarakat Kabupaten Ponorogo yang sudah memiliki usaha kecil untuk budidaya ikan pada suatu waktu banyak ikan yang dibudidayakan terserang penyakit, sehingga mengakibatkan hasil panen mereka sedikit dan tidak untung, bahkan mengalami kerugian. Kekhawatiran masyarakat mengenai hal tersebut ditakutkan akan terus terjadi setiap tahunnya apabila tidak diatasi secepatnya. Dan akhirnya ada beberapa orang yang mengusulkan untuk mengatasi hal tersebut mengenai perlunya seseorang yang dapat membantu masyarakat budidaya ikan lele. Selain itu untuk menguatkan budidaya ikan dan saling bertukar pikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik.



Awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yaitu seperti yang dijelaskan oleh responden pada Tabel 8.

Tabel 8. Awal Mula Berdirinya Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Responden	Informasi Awal Mula Berdirinya Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Desa Coper	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Kelompok pembudidaya itu berasal dari orang-orang yang sudah memiliki usaha. kemudian berdiskusi dengan Dinas untuk lebih kuat semisal kalau ada permasalahan bisa saling dibantu. Kemudian bantuan dari pemerintah harus atas dasar kelompok kalau hanya perseorang itu gak ada dasarnya jadi gak bisa mbak. Kelompok itu dikukuhkan oleh kepala desa setelah 1 tahun kemudian baru bisa mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.31 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah mereka yang sudah memiliki usaha budidaya sendiri. untuk menguatkan usahanya maka perlu adanya orang yang bisa membantu baik dalam hal permodalan atau konsultasi. Akhirnya dikomunikasikan dengan teman-teman dan di hadiri pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan membentuk kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sekaligus mengikuti program dari Dinas yaitu budidaya ikan lele Ponorogo 2016. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila usaha budidaya hanya milik perseorangan tidak bisa untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, melainkan harus atas dasar kelompok.
Bapak Komarudin	<i>Dulu banyak dari teman-teman sudah memelihara ikan karena hobi, kemudian ada program dari Dinas Pertanian yaitu program budidaya lele Ponorogo kita komunikasikan dengan teman-teman, pihak dinas dan kepala desa akhirnya membentuk kelompok (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.22 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Kronologinya kita kan punya lingkungan kelompok ya mbak kayak RT kegiatan yasinan dan arisan. Akhirnya ngobrol-ngobrol untuk mengembangkan penghasilan kemudian ada yang sudah bisa bikin kerupuk, ada yang sudah pernah ikut latihan gitu akhirnya ditawarkan (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.15 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah mereka yang sudah memiliki usaha budidaya sendiri untuk menguatkan usahanya maka perlu adanya orang yang bisa membantu baik dalam hal permodalan atau konsultasi. Akhirnya dikomunikasikan dengan teman-teman dan di hadiri pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan membentuk kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sekaligus mengikuti program dari Dinas yaitu budidaya ikan lele

Ponorogo 2016. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila usaha budidaya hanya milik perseorangan tidak bisa untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, melainkan harus atas dasar kelompok.

Setelah terbentuknya kelompok pembudidaya ikan Desa Coper, peran Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam menjalin sinergitas tidak berhenti sampai disitu. Hal tersebut terlihat jelas melalui penjelasan responden mengenai bantuan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Bantuan yang Diberikan Kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Responden	Informasi Bantuan yang Diberikan Kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Kalau bantuan yang diberikan untuk pembudidaya ikan melalui APBD dan APBN dan semuanya melalui dan diketahui oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Bantuan ini dalam bentuk penyediaan benih bermutu melalui BBI, konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.35 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yaitu sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan lele, 8 kolam intensif, 4 sak pakan, dan 1.500 benih ikan lele yang diberikan secara bertahap. Kemudian ikan-ikan lele dikelola dengan baik supaya menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap melalui APBD dan APBN yang diketahui oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Bapak Komarudin	<i>Diawal Dinas berbaik dengan kita, artinya peduli dan memandu. Dinas memberikan 8 kolam, baru dikirim 4 sak pakan, langsung dikasih 1.500 benih, langsung dipandu bagaimana cara budidaya yang baik. 1-3 bulan setelah itu kita berkembang sendiri setelah itu kita yang mandiri (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.30 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Dapat membeli ikan di kelompok budidaya lele desa Coper karna ajakan salah satu orang Dinas mbak, katanya lele disana kualitasnya baik dan harganya murah. Makanya sampai saat ini saya terus berlanjut membeli ikan lele kelompok itu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.23 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya peran Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang intinya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam memberikan pelayanan atau penyediaan benih bermutu melalui BBI (Balai Benih Ikan), konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yaitu sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan lele, 8 kolam intensif, 4 sak pakan, dan 1.500 benih ikan lele yang diberikan secara bertahap. Kemudian ikan-ikan lele dikelola dengan baik supaya menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap melalui APBD dan APBN yang diketahui oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

4.5.1.2 Peran *Civil Society* terhadap Proses Terjalinnnya Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Menurut Hikam Muhammad (2015), *Civil Society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Dari pengertian *civil society* di atas, maka ia mewujud dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah pengejawantahan kelembagaan *civil society*. *Civil Society* menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi yang

tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. *Civil Society* memerlukan berbagai macam aturan dan batasan-batasan serta mempersatukan dengan negara lewat kontrol hukum, administrasi, dan politik.

Peran Pemerintah dalam sinergitas *Stakeholders* pengelolaan pelayanan publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo akan menjadikan segala kegiatan lebih efektif dan efisien. Adapun *Stakeholders* lain yang sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo adalah *civil society*. *Civil society* yang dimaksud adalah masyarakat pembudidaya ikan, yaitu dalam penelitian saya pada masyarakat pembudidaya ikan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Kelompok budidaya ikan Desa Coper sebagai peran masyarakat merupakan salah satu kelompok budidaya ikan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ikan yang dibudidaya adalah jenis ikan lele, dimana yang diketuai oleh Bapak Komarudin. Konsep pengolahan yang diterapkan oleh kelompok ini adalah berbagai cara, ada yang budidaya lele menggunakan kolam intensif terdiri dari 8 kolam dan sistem budidaya kolam diatas tanah 8 kolam. Dalam kelompok budidaya di Desa Coper terdiri dari 16 anggota yang mengatur sistem budidaya.

Tugas utama dari kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Komarudin selaku ketua kelompok budidaya ikan lele desa Coper pada Tabel 10.

Tabel 10. Peran Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Peran Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Penyediaan benih bermutu melalui BBI, konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya peran masyarakat yaitu menghasilkan ikan lele yang berkualitas, membayar kas setiap bulan dengan besaran yang sama yaitu sebesar Rp 50.000,- digunakan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya, serta pembentukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yang dilaksanakan dengan musyawarah bersama masyarakat, kepala desa Coper dan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Bapak Komarudin	<i>Yang terpenting hasil panen ikan lele bagus sehingga laku dijual. Peran masyarakat juga dengan membayar iuran kepada kelompok budidaya ikan lele setiap bulannya supaya tetap berjalan. Iuran perbulannya itu sebesar Rp 50.000 per orang. Kita juga musyawarah mbak untuk membentuk kelompok ini yang disahkan oleh kepala desa dan dinas (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.37 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Dapat membeli ikan di kelompok budidaya lele desa Coper karna ajakan salah satu orang Dinas mbak, katanya lele disana kualitasnya baik dan harganya murah. Makanya sampai saat ini saya terus berlanjut membeli ikan lele kelompok itu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.23 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Tugas utama dari kelompok budidaya ikan lele adalah memberikan contoh cara budidaya yang baik dan optimal. Ikan lele pertama kali diperoleh dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2016. Peran masyarakat sebagai *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik di kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas setiap panen. Karena dengan masyarakat menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas maka kelompok budidaya ikan lele desa Coper dapat tetap berjalan.

Peran masyarakat juga membantu kelancaran pengelolaan pelayanan yang ada di kelompok budidaya ikan lele desa Coper dengan membayar kas kepada kelompok budidaya ikan lele desa Coper setiap bulannya sebesar Rp 50.000,-, serta pembentukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yang dilaksanakan dengan musyawarah bersama masyarakat, kepala desa Coper dan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Dapat diketahui bahwasanya besaran penetapan kas setiap orang sama. Adapun sistem pembayaran kas yang dilakukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah dengan membayarkan kas ketika kumpul, karena kelompok budidaya ikan lele Desa Coper setiap bulannya diadakan kumpul untuk membahas pengelolaan budidaya ikan lele. Perkumpulan dalam kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dilakukan setiap minggu awal pada setiap bulan sekaligus membayar kas. Alur pembayarannya dengan dikoordinasi oleh ketua kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.

Partisipasi dari masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper terlihat ketika pembayaran kas yang telah ditetapkan besarnya sebesar Rp 50.000,- setiap bulan ternyata tidak memberatkan masyarakat untuk budidaya ikan lele, karena masyarakat telah menyadari bahwasanya untuk memperoleh hasil panen ikan lele yang berkualitas harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk keberlangsungan kelompok budidaya ikan lele desa Coper

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa peran masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dalam sinergitas *Stakeholders* hal pengelolaan pelayanan publik adalah menghasilkan ikan yang berkualitas dan membayar kas setiap bulannya sebesar Rp 50.000,-. Adapun peran masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sangat menentukan keberlangsungan dari kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, karena kelompok budidaya ikan lele sangat membutuhkan ikan-ikan yang berkualitas dan kas dari anggota untuk

keberlangsungan proses budidaya seperti pembelian pakan dan obat-obatan dalam pengelolaan pelayanan. Namun dalam menjalankan perannya, masih terdapat beberapa hambatan yang harus dilalui, yaitu banyak dari masyarakat yang belum memahami cara budidaya menggunakan kolam diatas tanah sistem kolam diatas tanah, perawatan yang harus dilakukan ketika ikan-ikan terkena penyakit. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Komarudin pada Tabel 11.

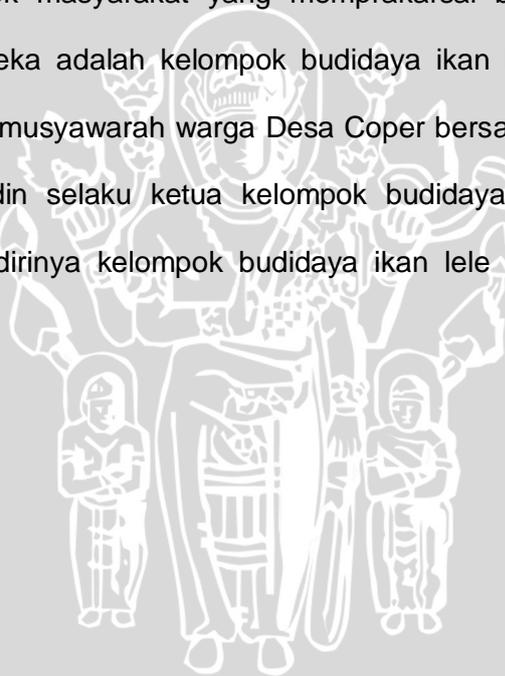
Tabel 11. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>terbatasnya personil untuk memback up 21 kecamatan yang ada di Ponorogo dan terbatasnya anggaran untuk mensupport pelaku usaha perikanan dalam peningkatan produksi dan pendapatannya (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo dari Masyarakat adalah sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem bioflok. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui tehnik budidaya menggunakan sistem kolam diatas tanah. Dan akhirnya mereka belajar sendiri.
Bapak Komarudin	<i>masyarakat belum terlalu paham cara budidaya dengan menggunakan kolam diatas tanah mbak, ya jadi kita perlu belajar bersama dan perlu bimbingan. Yang mengetahui cara budidaya dengan kolam diatas tanah ya hanya beberapa orang saja (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.17 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Produksi terkait cuaca, pemasaran masih terbatas sehingga menghambat produksi tidak memperoleh hasil yang banyak,tapi kemaren sudah dibantu dari Dinas mbak mereka memberikan kita outlet penjualan untuk produk kami. ketiga produksi juga mengenai alat kita masih manual (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.09 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya pelayanan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan sudah baik dan dapat diterima oleh sebagian masyarakat. Namun perlu diketahui Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan

pelatihan berupa budidaya ikan lele menggunakan kolam intensif. Sehingga banyak dari masyarakat yang belum memahami cara budidaya menggunakan kolam sistem kolam diatas tanah. Maka masyarakat terus belajar cara budidaya menggunakan kolam sistem kolam diatas tanah tanya-tanya kepada orang yang lebih paham. Meskipun awal pertama ketika belajar budidaya menggunakan sistem kolam diatas tanah banyak ikan yang terjangkit virus maupun penyakit lainnya bahkan sampai ikannya mati kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper terus belajar hingga benar-benar bisa.

Peran penting dari masyarakat dalam sinergitas *Stakeholders* terlihat pada sebuah kelompok masyarakat yang memprakarsai berjalannya proses pelayanan publik. Mereka adalah kelompok budidaya ikan lele yang didirikan awal tahun 2016 pada musyawarah warga Desa Coper bersama dengan kepala desa. Bapak Komarudin selaku ketua kelompok budidaya lele menjelaskan bahwa awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele dapat dilihat pada Tabel 12.



Tabel 12. Awal Mula Berdirinya Kelompon Pembudidaya Ikan Lele Desa Coper

Responden	Informasi Awal Mula Berdirinya Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Desa Coper	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Kelompok pembudidaya itu berasal dari orang-orang yang sudah memiliki usaha. kemudian berdiskusi dengan Dinas untuk lebih kuat semisal kalau ada permasalahan bisa saling dibantu. Kemudian bantuan dari pemerintah harus atas dasar kelompok kalau hanya perseorang itu gak ada dasarnya jadi gak bisa mbak. Kelompok itu dikukuhkan oleh kepala desa setelah 1 tahun kemudian baru bisa mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.31 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah mereka yang sudah memiliki usaha budidaya sendiri. untuk menguatkan usahanya maka perlu adanya orang yang bisa membantu baik dalam hal permodalan atau konsultasi. Akhirnya dikomunikasikan dengan teman-teman dan di hadiri pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan membentuk kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sekaligus mengikuti program dari Dinas yaitu budidaya ikan lele Ponorogo 2016. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila usaha budidaya hanya milik perseorangan tidak bisa untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, melainkan harus atas dasar kelompok.
Bapak Komarudin	<i>Dulu banyak dari teman-teman sudah memelihara ikan karena hobi, kemudian ada program dari Dinas Pertanian yaitu program budidaya lele Ponorogo kita komunikasikan dengan teman-teman, pihak dinas dan kepala desa akhirnya membentuk kelompok (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.22 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Kronologinya kita kan punya lingkungan kelompok ya mbak kayak RT kegiatan yasinan dan arisan. Akhirnya ngobrol-ngobrol untuk mengembangkan penghasilan kemudian ada yang sudah bisa bikin kerupuk, ada yang sudah pernah ikut latihan gitu akhirnya ditawarkan (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.15 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah mereka yang sudah memiliki usaha budidaya sendiri. untuk menguatkan usahanya maka perlu adanya orang yang bisa membantu baik dalam hal permodalan atau konsultasi. Akhirnya dikomunikasikan dengan musyawarah bersama teman-teman dan di hadiri pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan membentuk kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sekaligus mengikuti program dari Dinas yaitu budidaya ikan lele Ponorogo 2016. Usulan ini mendapat respon positif oleh masyarakat dan pemerintahan setempat, khususnya Desa Coper. Sebelumnya

masyarakat harus membuat proposal pengajuan bantuan ke Dinas Pertanian, selanjutnya dari pihak Dinas melakukan survey lokasi untuk melihat ketepatan apakah diberikan besarnya bantuan, dan apabila sudah disetujui dari pihak Dinas Pertanian maka bantuan akan turun ke kelompok budidaya lele selama 3 bulan. Sehingga masyarakat mendapat bantuan dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada bulan September 2016. Bantuan yang diberikan tidak langsung semua diberikan dalam 1 waktu, namun bantuan akan turun dengan bergantian selama 3-7 hari. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila usaha budidaya hanya milik perseorangan tidak bisa untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, melainkan harus atas dasar kelompok.

Bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu berupa:

1. Kolam intensif 8 kolam
2. Pakan ikan 24 sak, dimana tiap 1 kolam mendapatkan 4 sak pakan.
3. Bibit ikan lele sebanyak 1500 ekor
4. Memandu dalam proses budidaya ikan lele yang baik dan benar

Kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sampai saat ini usahanya semakin berkembang dengan dibuktikan bahwasanya setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang awalnya hanya 8 kolam intensif, setelah 4 bulan berjalan masyarakat dapat mengembangkan kolam menjadi 16 kolam. Dimana 8 kolam berasal dari bantuan Dinas Pertanian dan Perikanan dan 8 kolam diatas tanah dengan sistem kolam diatas tanah berasal dari pengembangan masyarakat sendiri. Hal ini karena masyarakat mengelola pelayanan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan dan dari masyarakat sendiri dengan baik, sehingga usaha budidaya ikan lele semakin berkembang. Proses awal operasi dari kelompok budidaya lele sampai saat ini mengangkat 16 pengurus untuk mengelola budidaya ikan lele.

Keseluruhan anggota berasal dari masyarakat sekitar Desa Coper sendiri, hal ini dikarenakan kelompok budidaya ikan lele berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa Coper.

Sistem pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan lele yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Proses Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele pada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Gambar 8 menggambarkan bahwa proses pengelolaan pelayanan pada kelompok budidaya ikan lele di Desa Coper. Proses kerja pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper terdiri dari beberapa tahap pekerjaan yang dirangkai menjadi satu alur besar. Alur yang dimulai dari mendapatkan pelayanan yaitu berupa bantuan kolam, pakan, benih, dan memandu dalam proses budidaya oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo hingga proses pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pelayanan yaitu berupa bantuan kolam, pakan, benih, dan memandu dalam proses budidaya oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Awal dari proses kerja kelompok budidaya ikan lele adalah ketika kelompok mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan berupa kolam sebanyak 8 buah, pakan sebanyak 24 sak (setiap satu kolam mendapatkan 4 sak), benih ikan lele sebanyak 1500 ekor, dan panduan proses budidaya ikan lele. Bantuan diberikan secara berkala 3-7 hari.

2. Pemberian pakan

Langkah kedua dari proses kerja budidaya ikan lele yaitu pemberian pakan pada ikan lele. Pemberian pakan ikan lele dilakukan selama 2 kali dalam satu hari yaitu pada pagi dan sore hari. Pakan ikan lele menggunakan pelet yang dicampurkan dengan probiotik guna untuk memberikan berat tubuh pada ikan lele dan menopang kesehatan pada ikan lele. Pakan lele yang digunakan untuk ikan lele yang berukuran kecil, pakan perlu direndam air dahulu sekitar 5 menit untuk melunakkan pakan lele supaya ikan lele dapat dengan mudah memakan pakan tersebut.

3. Menguras kolam

Kolam budidaya terdapat 8 kolam intensif dan 8 kolam diatas tanah dengan sistem kolam diatas tanah. Kolam intensif dikuras kurang lebih selama 1 bulan sekali, namun biasanya kondisional tergantung dengan kondisi air dalam kolam. Apabila air sudah keruh dan berwarna kehijauan atau kecokelatan maka perlu dikuras. Setelah dikuras kolam diberi pupuk, garam dan probiotik untuk menumbuhkan pakan alami. Namun perlu didiamkan selam 7 hari terlebih dahulu, baru kemudian diberi air dalam kolam untuk menetralkan kondisi kolam untuk habitat ikan. Untuk kolam diatas tanah dengan sistem kolam diatas tanah,

kolam tidak perlu dikuras. Namun dalam sirkulasi pergantian air menggunakan pipa yang disalurkan dengan probiotik untuk menumbuhkan bakteri.

4. Pembuatan probiotik

Probiotik digunakan untuk menghilangkan bau amis pada kolam dan untuk menambah gizi pada ikan supaya ikan mudah besar dan sehat. Probiotik dibuat menggunakan rempah-rempah yang digiling sampai halus kemudian dicampur dengan gula merah dan susu murni, selanjutnya dimasak sampai mendidih, di pindah dalam tabung dan ditutup (difermentasi) selama 1 bulan untuk menumbuhkan bakteri.

5. Pemisahan berdasarkan jenis ukuran ikan

Pemisahan ikan lele dilakukan ketika menguras kolam. Pemisahan ikan dilakukan untuk mengelompokkan ikan-ikan yang ukuran besar digunakan sebagai indukan dan ikan-ikan yang ukuran kecil.

6. Pemasaran

Pemasaran ikan-ikan lele dilakukan secara langsung. Pengepul-engepul berdatangan ke masyarakat Desa Coper untuk membeli, terkadang dari sekeliling desa, serta mitra dengan pihak swasta yakni pengolah ikan lele salah satunya adalah kelompok pengolah "Wanita Mulya" Watubonang.

4.5.1.3 Peran *Private Sector* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Didalam sebuah pengelolaan pelayanan publik yang baik, diharapkan tercipta sebuah keterpaduan atau sinergitas antara semua *Stakeholders* yang ada didalam masyarakat. Keterlibatan semua *Stakeholders* tersebut tidak lain adalah untuk membantu tercapainya tujuan bersama agar lebih efektif dan efisien serta lebih ekonomis. Salah satu *Stakeholders* yang diharapkan keterlibatannya dalam pengelolaan pelayanan publik pada Bidang Perikanan,

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo selain dari pihak Pemerintah dan masyarakat adalah keterlibatan dari pihak swasta.

Selama Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo berjalan hingga saat ini, berdasarkan hasil data pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa sedikitnya ada 1 orang sebagai pihak swasta yang melakukan bisnis atau pembelian ikan-ikan lele yang dimiliki oleh kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Adapun pihak swasta disebut oleh pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sebagai teman. Teman bisnis dalam pembelian ikan-ikan lele adalah Kelompok Pengolah “Wanita Mulya” Watubonang yang diketuai oleh Ibu Harni.

Lebih lanjut, melalui pengecekan secara mendalam yang dilakukan oleh penulis, ternyata terdapat 1 pihak swasta yang melakukan bisnis atau jual beli ikan-ikan lele dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, yang lainnya berasal dari pengepul-pengepul dan masyarakat sekitar Desa Coper.

Keterlibatan pihak swasta ini dalam berbisnis dengan pihak masyarakat budidaya ikan lele secara tidak langsung juga ikut membantu pengelolaan pelayanan publik yang ada di kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Dengan adanya pihak swasta ini menjadikan proses pengelolaan pelayanan berupa budidaya ikan lele yang ada di kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dapat terus berjalan. Karena dengan dana hasil penjualan ikan lele yang memiliki kualitas baik akan bernilai jual tinggi, pihak kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dapat mendanai proses-proses pengelolaan pelayanan yang baik.

Menurut Ibu Harni selaku ketua pihak swasta kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang mengatakan bahwa keterlibatannya dalam berbisnis olahan hasil perikanan dengan pihak kelompok budidaya ikan lele sudah dimulai sejak tahun 2016. Adapun Ibu Harni terlibat dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper merupakan ajakan dari pihak Bidang Perikanan,

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Berikut penjelasan dari Ibu Harni dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Peran Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Peran Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pengelolaan Pelayanan Publik di Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Penyediaan benih bermutu melalui BBI, konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikana Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya peran swasta (kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang yaitu bermitra melakukan bisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk membeli ikan-ikan lele yang digunakan untuk membuat produk olahan dari ikan lele berupa kerupuk ikan.
Bapak Komarudin	<i>Yang terpenting hasil panen ikan lele bagus sehingga laku dijual. Peran masyarakat juga dengan membayar iuran kepada kelompok budidaya ikan lele setiap bulannya supaya tetap berjalan. Iuran perbulannya itu sebesar Rp 50.000 per orang. Kita juga musyawarah mbak untuk membentuk kelompok ini yang disahkan oleh kepala desa dan dinas (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.37 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Dapat membeli ikan di kelompok budidaya lele desa Coper karna ajakan salah satu orang Dinas mbak, katanya lele disana kualitasnya baik dan harganya murah. Makanya sampai saat ini saya terus berlanjut membeli ikan lele kelompok itu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.23 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dapat diketahui dari data diatas bahwasanya, keterlibatan pihak swasta di kelompok budidaya ikan lele berlangsung sejak tahun 2016. Pihak swasta mengetahui dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan. Ikan-ikan lele yang ada dikelompok budidaya ikan lele Desa Coper memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, hal ini membuat pihak swasta terus bermitra dengan pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Karena banyak orang yang membeli hasil olahan dari pihak swasta dan semua orang menyukainya. Bisnis yang dilakukan pihak budidaya ikan lele merupakan bisnis untuk

kepentingan operasional budidaya ikan lele. Perlu diketahui bahwasanya tidak sebagaimana bisnis pada umumnya, pihak masyarakat melakukan bisnis bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun untuk keberlangsungan pengelolaan pelayanan yaitu budidaya.

4.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

4.3.2.1 Faktor Pendukung Sinergitas

- a. Dukungan Pemerintah kepada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Banyak faktor yang menjadikan sinergitas *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dapat berjalan dengan baik seperti sekarang ini. Semua itu tidak terlepas dari *Stakeholders* dalam elemen masyarakat yang selalu mendukung dan mendampingi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan. Dari seluruh *Stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik, dapat dikelompokkan menjadi 3 aktor besar, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Ketiganya menurut ilmu Administrasi Publik dalam perspektif *Governance* disebut dengan *Stakeholders Governance*, dan adanya dukungan yang diberikan oleh *Stakeholders Governance* tersebut disebut dengan sinergitas.

Dukungan dari pemerintah dalam menghimpun masyarakat dan membimbing mereka untuk dapat mengelola pelayanan publik setiap masyarakat secara terpadu merupakan faktor terbentuknya sinergitas antara *civil society* dengan *Governance*. Dukungan *Governance* atau Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan sangat mempengaruhi berdirinya dan berjalannya kelompok

budidaya ikan lele. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh *stakeholders* pada Tabel 14.

Tabel 14. Dukungan dari Pemerintah Terbentuknya Sinergitas antara *stakeholders*

Responden	Informasi Dukungan dari Pemerintah Terbentuknya Sinergitas antara <i>stakeholders</i>	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat terkait dalam hal pelayanan masyarakat. Dengan adanya interaksi ketiganya ini maka diharapkan pelayanan yang diberikan semakin meningkat. Saat ini kita perbanyak bantuan untuk masyarakat (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut dijelaskan bahwasanya dukungan dari Pemerintah sehingga terbentuknya sinergitas antara <i>stakeholders</i> dibuktikan dengan Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan bantuan sarana dan prasana, serta outlet pemasaran kepada masyarakat dan swasta.
Bapak Komarudin	<i>Sejauh ini alhamdulillah dari pemerintah sudah banyak membantu kita ya mbak dengan memberikan bantuan itu tadi. Begitu juga kelompok pengolah ikan lele juga membantu dalam pemasaran ikan lele. Dinas itu memantau kalau kita minta aja mbak, jadi gak tiap bulan kita ada pemantauan perkembangan (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.39 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	Masyarakat mengelola bantuan yang diberikan dari Dinas dengan baik sehingga menghasilkan ikan yang berkualitas yang akan dijual ke pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang. Pihak swasta menjadi pelanggan membeli ikan lele pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.
Ibu Harni	<i>Dari kelompok budidaya kita sudah tidak ada masalah mengenai harga yang dijual juga pas dengan kualitas ikannya, hubungan kita juga sangat baik. Kalau dinas juga sudah banget mbk sudah membantu merekomendasikan outlet penjualan oleh-oleh (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.25 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	Namun perlu diketahui pihak pemerintah kurang dalam pemantauan perkembangan pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwasanya dukungan dari Pemerintah sehingga terbentuknya sinergitas antara *stakeholders* dibuktikan dengan Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan bantuan sarana dan prasana, serta *outlet* pemasaran kepada masyarakat dan swasta. Masyarakat mengelola bantuan yang diberikan dari Dinas dengan baik sehingga menghasilkan ikan yang berkualitas yang akan dijual ke pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang. Pihak swasta menjadi pelanggan membeli ikan lele pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo sangat mendukung dan membantu penuh diawal kegiatan budidaya ikan yang diberikan kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo memberikan berbagai bantuan secara bertahap berupa 8 kolam, 4 sak pakan, 1.500 benih ikan lele, dan memandu bagaimana cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Namun sangat disayangkan setelah berjalan satu sampai tiga bulan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper berkembang mandiri, dan jarang dilakukannya pemantauan terlibat perkembangan budidaya ikan lele.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, peran *Governance* dalam pengelolaan pelayanan publik di kelompok budidaya ikan lele sangatlah penting dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk peduli terhadap tata cara pengelolaan pelayanan publik yang baik dan benar. Adanya peran dari Pemerintah juga menjadi pemicu terciptanya dan berjalannya kelompok budidaya ikan lele. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam terciptanya *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik secara terpadu di kelompok budidaya ikan lele adalah dengan adanya keterlibatan Pemerintah. Dinas Pertanian memberikan bantuan berupa kolam, pakan, benih, dan tata cara budidaya yang baik. Adapun dukungan yang diberikan oleh pihak *Governance* atau Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo berupa kolam intensif 8 buah, pakan sebanyak 24 sak (setiap satu kolam mendapatkan 4 sak), benih ikan lele sebanyak 1.500 ekor, dan panduan proses budidaya ikan lele. Bantuan diberikan secara berkala 3-7 hari pada tahun 2016.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, peran *Governance* dalam pengelolaan pelayanan berupa budidaya ikan di kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sangatlah penting dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk

peduli terhadap tata cara pengelolaan pelayanan berupa budidaya ikan lele yang baik dan benar. Peran Pemerintah menjadi pemicu terciptanya dan berjalannya budidaya ikan lele. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya salah satu faktor pendukung dalam terciptanya sinergitas *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan berupa budidaya ikan lele yang baik pada kelompok budidaya ikan lele adalah adanya keterlibatan dengan Pemerintah.

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, partisipasi, efisiensi dan keadilan sudah terlaksanakan. Yaitu dibuktikan dengan adanya transparansi menciptakan kepercayaan antar *stakeholders* ketika ikan-ikan terserang penyakit, kelompok budidaya ikan lele Desa Coper meminta bantuan atau solusi ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan diberikan dengan tepat. Partisipasi dari kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yaitu dengan mengadakan musyawarah pembentukan kelompok yang dihadiri oleh perwakilan anggota Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, perangkat desa Coper, dan anggota masyarakat yang berkontribusi untuk ikut kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Selain itu juga dengan adanya kas wajib yang dibayarkan anggota kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper sebesar Rp 50.000 setiap satu bulan sekali. Keadilan yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo membuka lebar untuk semua masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam pengajuan proposal bantuan. Efisiensi yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo selalu memberikan informasi yang terbaru contohnya program budidaya ikan lele Kabupaten Ponorogo tahun 2016.

b. Peran Aktif Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Peran aktif masyarakat yang terlihat dalam kelompok budidaya ikan sangat mempengaruhi terjadinya sinergitas antara *stakeholders* khususnya sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah dalam pengelolaan pelayanan publik di

kelompok budidaya ikan. Hal ini terlihat pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yang selalu menghasilkan hasil panen ikan lele yang berkualitas dan adanya iuran kelompok setiap bulannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Komarudin pada Tabel 15.

Tabel 15. Peran Aktif Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Responden	Informasi Peran Aktif Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Penyediaan benih bermutu melalui BBI, konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya Peran aktif masyarakat yaitu menghasilkan ikan lele yang berkualitas. Selain itu juga membayar kas setiap bulan dengan besaran yang sama yaitu Rp 50.000,- yang digunakan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya.
Bapak Komarudin	<i>Yang terpenting hasil panen ikan lele bagus sehingga laku dijual. Peran masyarakat juga dengan membayar iuran kepada kelompok budidaya ikan lele setiap bulannya supaya tetap berjalan. Iuran perbulannya itu sebesar Rp 50.000 per orang. Kita juga musyawarah mbak untuk membentuk kelompok ini yang disahkan oleh kepala desa dan dinas (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.37 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Dapat membeli ikan di kelompok budidaya lele desa Coper karna ajakan salah satu orang Dinas mbak, katanya lele disana kualitasnya baik dan harganya murah. Makanya sampai saat ini saya terus berlanjut membeli ikan lele kelompok itu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.23 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dapat diketahui dari data diatas bahwasanya, Peran masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yaitu menghasilkan ikan lele yang berkualitas. Selain itu juga membayar kas setiap bulan dengan besaran yang sama yaitu Rp 50.000,- yang digunakan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya guna keberlangsungan pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele.

Kebijakan yang diambil oleh Bapak Komarudin selaku ketua Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yaitu dengan mengumpulkan seluruh

masyarakat, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Coper untuk melakukan musyawarah pembentukan kelompok dan untuk menguatkan dalam operasional budidaya ikan lele, dan masyarakat turut aktif dalam musyawarah tersebut. Hal ini memang diinginkan oleh masyarakat Desa Coper, terbukti kehadiran perwakilan dari setiap lembaga desa dan masyarakat dalam musyawarah dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Wakil Masyarakat yang Hadir dalam Rapat Perencanaan Pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Lele 2016.

No	Wakil Masyarakat	Kehadiran
1	Perangkat Desa	2
2	Ketua RT/RW	10
3	Tokoh Masyarakat	25

Sumber : *Arsip Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper*

Terlihat pada Tabel 16. Sinergitas yang terjalin antara Pemerintah dan masyarakat tidak hanya dalam musyawarah awal pendirian kelompok budidaya ikan lele saya, namun keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan operasional setiap bulannya atau kas. Dengan kas yang diberikan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk tetap menjaga keberlangsungan dari kelompok budidaya ikan lele itu sendiri. Penetapan kas dari masyarakat untuk budidaya ikan lele yaitu sebesar Rp 50.000 per orang setiap satu bulan sekali. Dukungan dari masyarakat menjadi faktor pendukung terjalinnya sinergitas *stakeholders Governance* dalam pengelolaan pelayanan di kelompok budidaya ikan lele.

c. Keterkaitan Pihak Swasta Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pendanaan Operasional Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele

Faktor pendukung sinergitas lainnya adalah adanya keterlibatan pihak swasta yaitu kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam pendanaan operasional pengelolaan pelayanan pada budidaya ikan lele. Adanya

kerjasama bisnis yang terjalin antara pihak swasta dengan kelompok budidaya ikan lele menjadi salah satu faktor terjalinnya sinergitas *Stakeholders* pengelolaan budidaya ikan lele di kelompok budidaya ikan lele. Sesuai dengan penjelasan Ibu Harni pada Tabel 17.

Tabel 17. Keterkaitan Pihak Swasta Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pendanaan Operasional Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele

Responden	Informasi Keterkaitan Pihak Swasta Kelompok Pengolah Ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam Pendanaan Operasional Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Penyediaan benih bermutu melalui BBI, konsultasi perikanan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha demi peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.42 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya dengan adanya keterkaitan pihak swasta (kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam pendanaan operasional pengelolaan pelayanan yaitu bermitra melakukan bisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk membeli ikan-ikan lele yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan dari ikan lele berupa kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele.
Bapak Komarudin	<i>Yang terpenting hasil panen ikan lele bagus sehingga laku dijual. Peran masyarakat juga dengan membayar iuran kepada kelompok budidaya ikan lele setiap bulannya supaya tetap berjalan. Iuran perbulannya itu sebesar Rp 50.000 per orang (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.37 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Dapat membeli ikan di kelompok budidaya lele desa Coper karna ajakan salah satu orang Dinas mbak, katanya lele disana kualitasnya baik dan harganya murah. Makanya sampai saat ini saya terus berlanjut membeli ikan lele kelompok itu (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.23 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dapat diketahui dari data diatas bahwasanya dengan adanya keterkaitan pihak swasta (kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” Watubonang dalam pendanaan operasional pengelolaan pelayanan yaitu bermitra melakukan bisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk membeli ikan-ikan lele yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan dari

ikan lele berupa kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele. keterlibatan pihak swasta di kelompok budidaya ikan lele berlangsung sejak tahun 2016. Pihak swasta mengetahui dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan. Ikan-ikan lele yang ada dikelompok budidaya ikan lele Desa Coper memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, hal ini membuat pihak swasta terus bermitra dengan pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Karena banyak orang yang membeli hasil olahan dari pihak swasta dan semua orang menyukainya. Bisnis yang dilakukan pihak budidaya ikan lele merupakan bisnis untuk kepentingan operasional budidaya ikan lele. Perlu diketahui bahwasanya tidak sebagaimana bisnis pada umumnya, pihak masyarakat melakukan bisnis bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun untuk keberlangsungan pengelolaan pelayanan yaitu budidaya.

Adanya keterlibatan dari pihak *private sector* untuk membeli ikan-ikan lele dari kelompok budidaya ikan lele menjadikan sinergitas *Stakeholders* yaitu pihak masyarakat dengan pihak swasta dalam pengelolaan pelayanan dikelompok budidaya ikan lele berjalan dengan baik.

4.3.2.2 Faktor Penghambat Sinergitas

Dalam menjalani sebuah proses menuju suatu tujuan, pasti terdapat suatu faktor yang menjadi pendukung dan beberapa hal yang dapat menghambat. Begitu pula yang terjadi dalam sebuah proses penciptaan sebuah sinergitas antara *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik untuk menciptakan sebuah administrasi publik yang demokratis. Meskipun masalah tersebut sudah dilalui, tetapi untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam sinergitas antara *Stakeholders Governance* dalam pengelolaan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele Desa Coper

Faktor yang menghambat terjalannya sinergitas antara *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan yang ada di kelompok budidaya ikan lele yaitu dari masyarakat sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Komarudin selaku ketua kelompok budidaya ikan lele Desa Coper pada Tabel 18.

Tabel 18. Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Pelayanan Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Responden	Informasi Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele Desa Coper	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Terbatasnya personil untuk memback up 21 kecamatan yang ada di Ponorogo dan terbatasnya anggaran untuk mensupport pelaku usaha perikanan dalam peningkatan produksi dan pendapatannya (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan dari Masyarakat adalah sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah. Dan akhirnya mereka belajar sendiri.
Bapak Komarudin	<i>Masyarakat belum terlalu paham cara budidaya dengan menggunakan kolam diatas tanah mbak, ya jadi kita perlu belajar bersama dan perlu bimbingan. Yang mengetahui cara budidaya dengan kolam diatas tanah ya hanya beberapa orang saja (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.17 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Produksi terkait cuaca, pemasaran masih terbatas sehingga menghambat produksi tidak memperoleh hasil yang banyak,tapi kemaren sudah dibantu dari Dinas mbak mereka memberikan kita outlet penjualan untuk produk kami. ketiga produksi juga mengenai alat kita masih manual (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.09 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa faktor penghambat terjalannya proses sinergitas antara *Stakeholders Governance* yaitu masyarakat, dalam pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele di kelompok budidaya ikan lele desa Coper adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai cara budidaya menggunakan kolam diatas tanah atau sistem kolam diatas tanah.

Perlu adanya bimbingan atau sosialisasi dari pihak pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan yang bekerja sama dengan kelompok budidaya ikan lele desa Coper mengenai cara budidaya lele dengan sistem kolam diatas tanah kepada masyarakat. Selain memberikan sosialisasi, pihak Pemerintah beserta pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele juga memberikan pelatihan untuk mengelola budidaya ikan lele menggunakan kolam diatas tanah kepada masyarakat.



- b. Terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan anggaran untuk mengelola 21 Kecamatan dalam pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo

Berbagai kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, dijelaskan oleh ibu Aida pada Tabel 19.

Tabel 19. Terbatasnya Petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan Anggaran untuk Mengelola 21 Kecamatan dalam Pelaku Usaha Perikanan yang Ada di Kabupaten Ponorogo

Responden	Informasi Terbatasnya Petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan Anggaran untuk Mengelola 21 Kecamatan dalam Pelaku Usaha Perikanan yang Ada di Kabupaten Ponorogo	Kesimpulan
Ibu Aida	<i>Terbatasnya personil untuk memback up 21 kecamatan yang ada di Ponorogo dan terbatasnya anggaran untuk mensupport pelaku usaha perikanan dalam peningkatan produksi dan pendapatannya (Hasil wawancara tanggal 19 Januari 2017 pukul 09.25 WIB di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo).</i>	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan dari Pemerintah yaitu karena terbatasnya pegawai yang ada sehingga sulit untuk mengelola 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, serta terbatasnya anggaran untuk mendukung usaha perikanan. Selain itu kelompok budidaya ikan lele Desa Coper hanya dibimbing diawal saja. Untuk pemantauan dari pihak Pemerintah setelah diberikan bantuan masih kurang.
Bapak Komarudin	<i>Masyarakat belum terlalu paham cara budidaya dengan menggunakan kolam diatas tanah mbak, ya jadi kita perlu belajar bersama dan perlu bimbingan. Yang mengetahui cara budidaya dengan kolam diatas tanah ya hanya beberapa orang saja. Kita juga hanya dibimbing diawal saja mbak (Hasil wawancara tanggal 05 Januari 2017 pukul 15.17 WIB di Rumah Bapak Komarudin Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).</i>	
Ibu Harni	<i>Produksi terkait cuaca, pemasaran masih terbatas sehingga menghambat produksi tidak memperoleh hasil yang banyak,tapi kemaren sudah dibantu dari Dinas mbak mereka memberikan kita outlet penjualan untuk produk kami. ketiga produksi juga mengenai alat kita masih manual (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2017 pukul 09.09 WIB di Rumah Ibu Harni Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).</i>	

Dari uraian diatas bahwasanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk menjalin sinergitas, masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya adalah terbatasnya pegawai untuk

menkoordinasi 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo dari 130 pembudidaya ikan dan terbatasnya anggaran dana untuk proses keberlangsungan usaha yang digunakan untuk mendukung dalam usaha perikanan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan pelaku usaha perikanan. Sehingga kelompok budidaya ikan lele Desa Coper hanya dibimbing dan diberikan bantuan diawal saja. Untuk pemantauan dari pihak Pemerintah setelah diberikan bantuan masih kurang. Berdasarkan prinsip *good Governance* prinsip akuntabilitas masih belum terpenuhi karena bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dipertanggung jawabkan diawal saja, untuk diakhir program pertanggung jawabannya masih belum ada untuk pemantauannya.

4.6 Analisis Data Fokus Penelitian

4.6.1 Proses Terjalannya Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan sebuah manajemen yang lebih teratur dan lebih baik. Mengetahui tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan mengajak masyarakat untuk dapat mengatasi masalah tersebut yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat usaha bidang perikanan terutama pada kelompok budidaya ikan lele, supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat adil dan merata.

Administrasi atau manajemen menurut Sondang P.Siagian (1986) adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk mendapatkan sesuatu hasil dalam mencapai tujuan bersama melalui berbagai kegiatan orang lain. Sedangkan demokrasi merupakan suatu prinsip dalam kebebasan yang mencakup bebarapa prosedur dan praktik yang terbentuk melalui cara yang berliku-liku sehingga disebut kebebasan atau kelembagaan (Alamudi, 1991).

Administrasi negara baru yang muncul dalam pengelolaan pelayanan publik adalah mengenai adanya keadilan sosial yang diberikan oleh pihak Pemerintah, terkait pilihan layanan yaitu kepada masyarakat budidaya ikan lele yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah. Contohnya dalam hal ini adalah memberikan kekuasaan kepada masyarakat kelompok budidaya ikan lele untuk dapat membuat kebijakan sendiri terkait pengelolaan pelayanan di wilayah mereka. Menurut Mubyarto (1995), keadilan sosial merupakan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia secara adil oleh negara.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa keadilan sosial yang dimaksud adalah suatu pernyataan yang terdiri dari pengertian, pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan berbagai manajemen. Serta menekankan terhadap kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan organisasi. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper, bahwa Pemerintah memberikan pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, dan pilihan berbagai manajemen untuk dapat mengelola pelayanan dalam kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Bahkan secara tidak langsung muncul paradigma paham demokrasi didalam masyarakat khususnya masyarakat kelompok budiya ikan lele Desa Coper untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan.

Administrasi negara baru dan demokrasi sangat erat kaitannya dengan Pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. karena tugas dan beban Pemerintah secara tidak langsung menjadi berkurang karena adanya lembaga atau instansi lain yang turut melaksanakan tugas Pemerintah, dalam hal ini yaitu kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang. Bahkan kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang juga berperan sebagai penghubung antara individu dan lembaga sosial Pemerintah. Yaitu membantu dalam pembelian ikan-ikan lele oleh masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.

Peran Pemerintah tidak hanya itu saja, setelah kelompok budidaya ikan telah didirikan dan proses budidaya dijalankan, Pemerintah mengambil peran untuk membimbing dan mengawasi berjalannya kelompok budidaya ikan tersebut. Adanya peran pemerintah untuk membimbing dan mengawasi berjalannya kelompok budidaya ikan merupakan suatu bentuk dari sebuah kemitraan. Kemitraan menurut Hafsah (2000), yaitu suatu strategi dalam usaha yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam waktu tertentu untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan Partono (2004), bahwasanya kemitraan merupakan suatu usaha dengan menerapkan strategi pengembangan yang terjadi hubungan kerja sehingga bersifat sinergis, suka rela, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan pembinaan.

Usaha yang dimaksud adalah mengelola pelayanan publik secara baik, sehingga hasilnya menjadi lebih optimal, yaitu Pemerintah secara tidak langsung dapat memberikan layanan berupa sarana dan prasarana yang lebih baik. Masyarakat selaku penerima layanan mendapatkan sarana dan prasarana yang baik pula yaitu pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Sehingga terjadi suatu keadaan yang saling menguntungkan yaitu saling memberikan manfaat, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih optimal. Menurut Hafsah (2000), maksud dan tujuan kemitraan adalah "*win-win solution partnership*" yaitu antara kedua belah pihak keduanya mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin kemandiriannya, serta dapat meningkatkan kualitas sumberdaya pada kelompok mitra.

Pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan lele Desa Coper adalah pengelolaan pelayanan dilakukan

secara terpadu. Pengelolaan pelayanan secara terpadu sebagaimana yang dijelaskan oleh Batinggi A dan Badu (2014), adalah pelayanan yang efektif dan efisien, dimana efektif pemberian pelayanan yang cepat dan memuaskan, efisien yaitu layanan yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Proses akhir dari pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan lele adalah menghasilkan ikan-ikan yang bermutu dan berkualitas sehingga memiliki nilai harga jual tinggi yang akan dijual kepada pihak swasta.

Keberadaan pihak swasta sangat membantu sekali dalam proses pengelolaan pelayanan publik. bahkan dengan adanya pihak swasta dalam berbisnis di masyarakat pembudidaya ikan lele secara tidak langsung ikut membantu dalam pengelolaan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan pihak swasta untuk berbisnis dengan kelompok pembudidaya ikan lele dengan membeli ikan-ikan lele tersebut merupakan salah satu proses kemitraan yaitu membentuk ikatan kerja sama yang saling membutuhkan. Sejalan dengan Jasuli A (2004), bahwasanya kemitraan ini merupakan bentuk persekutuan antara dua belah pihak sehingga membentuk ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang usaha sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Adapun bentuk saling membutuhkan antara pihak swasta dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper terlihat dari hasil menjual ikan-ikan lele, sedangkan pihak swasta Kelompok pengeolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang membutuhkan ikan-ikan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan bisnis olahan perikanan yaitu kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele kepala ikan.

Pemerintah, masyarakat dan swasta yang peduli akan pemasukan pelayanan publik disebut dengan *Stakeholders*. Sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh Solihin (2009), bahwasanya, adanya tanggung jawab sosial suatu instansi merupakan salah satu dari tanggung jawab instansi tersebut kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetapi, berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholders* terhadap masalah pengelolaan pelayanan publik, *stakeholders* ini dapat sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai *stakeholders* kunci. Karena pemerintah yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* dalam hal ini adalah Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
2. Masyarakat sebagai *stakeholders* utama (primer). Karena masyarakat memiliki kaitan peran dan kepentingan secara langsung dalam tanggungjawab dan proses pengelolaan pelayanan publik. *Stakeholders* dalam hal ini adalah kelompok pembudidaya ikan lele Desa Coper
3. Swasta sebagai pendukung (sekunder). Karena swasta tidak memiliki kaitan peran dan kepentingan secara langsung terhadap proses pengelolaan pelayanan publik secara terpadu di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan, namun memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap masalah pengelolaan pelayanan publik yang ada pada kelompok budidaya ikan lele disamping ikut berbisnis. Pihak swasta dalam hal ini adalah kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang.

Keterlibatan aktif ketiga *Stakeholders* tersebut yaitu Pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam masalah pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, selain itu menjadi *stakeholders* mereka juga merupakan pilar-pilar terciptanya *Governance*. Adapun *Governance* sebagaimana yang dijelaskan oleh Krina (2003) yaitu *Governance* merupakan penggunaan wewenang politik, ekonomi dan administrasi untuk pengelolaan kegiatan negara. Tata Pemerintahan terdiri dari

semua mekanisme, proses dan lembaga-lembaga terdiri dari warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengusulkan kepentingan mereka, penggunaan hak, pemenuhan kewajiban dan penjabatani perbedaan diantara mereka.

Keterlibatan aktif dari *stakeholders Governance* ini dalam masalah pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo juga menciptakan sebuah *Good Governance*, karena sinergitas yang dilakukan oleh *Stakeholders Governance* menjadikan Pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan sebuah layanan, serta terjalin interaksi yang baik antara *Stakeholders Governance*. Pada sistem pemerintahan terdapat variasi antara pengetahuan dan modal yang ada pada beberapa instansi. Variasi ini berhubungan dengan hak kepemilikan, dimana terdapat hak kepemilikan yang ramah dengan keadaan yang baik. Kepemilikan ini akan mempengaruhi kinerja pemerintahan. Dengan adanya hubungan baik dan kuat antara beberapa instansi pemerintahan juga akan mendukung keberhasilan dan profitabilitas kerja (Huse, 2005).

Menurut Rosyada A.A (2016), konsep *Good Governance* ada karena adanya kinerja aparat pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik yang kurang efektif. Selain itu *Good Governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak hanya didasarkan pada pemerintah saja, namun perlu melibatkan sebuah elemen baik dari dalam birokrasi maupun luar birokrasi publik (masyarakat). Pemerintah yang didekatkan dengan rakyat akan dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi dari masyarakat, karena kebijakan yang di ambil dapat menggambarkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi dari masyarakat yang dilayaninya. Strategi untuk mengidentifikasi *stakeholders* menggunakan sistem studi kasus. Pendekatan harus dibuat semenarik mungkin akan meningkatkan nilai kinerja *stakeholders* secara

bersamaan. Strategi ini dapat dengan mudah untuk melihat hal yang negatif dari stakeholders lain (Tantalo C and Richard L P, 2014).

Menciptakan sebuah *Good Governance* diperlukan tiga pilar yang harus saling mendukung tercapainya sebuah tujuan bersama, dalam hal ini ketiga pilar tersebut adalah *Governance*, *civil society*, dan *private sector*. Hubungan antara ketiga *Stakeholders* dalam membangun *Good Governance* terlihat pada kesesuaian prinsip-prinsip yang ada dalam *Good Governnace* yang dikemukakan oleh Effendi (2005) yaitu tiga pilar untuk mendukung pelaksanaan *Good Governance*, yaitu Pemerintah, *civil society* (masyarakat), dan pasar atau dunia usaha. Ketiga unsur ini mempunyai hubungan yang kuat dan sinergik dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi. Hubungan antara ketiganya dapat berkembang dengan adanya kepercayaan, transparansi, partisipasi, dan aturan yang jelas dan pasti. Kunci utama dalam menciptakan *Good Governance* yaitu kepemimpinan yang mempunyai legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Apabila ketiga pilar aktor tersebut menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka akan terjadi proses yang sinergitas antar ketiga aktor sehingga secara umum sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini yaitu pencapaian tujuan dalam pengelolaan pelayanan publik yang baik.

Terjadinya sinergitas antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat maka akan mempercepat tercapainya tujuan nasional. Sama halnya dengan yang terjadi pada pengelolaan pelayanan publik yang terjadi di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, terdapat peran aktif dari ketiga *Stakeholders* didalamnya, sehingga mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan nasional yang berupa pengelolaan pelayanan publik yang

baik dan benar, bahkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi tujuan nasional lain yaitu adanya lowongan pekerjaan lain bagi masyarakat sekitar. Sehingga menambah angka masyarakat yang bekerja dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Ponorogo.

Proses musyawarah yang dilakukan untuk menangani masalah oleh Pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya proses demokrasi. Menurut Supardan D (2015), demokrasi berkaitan erat dengan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Sistem demokrasi berpacu pada jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban sesama manusia, yaitu kehidupan demokrasi mengandalkan kebersamaan, kolektivitas bukan individualitas absolut. Adanya pengelolaan pelayanan publik secara terpadu yang dijalankan oleh masyarakat budidaya ikan lele atas bantuan dari pihak Pemerintah dan kebijakan dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mencari dana melalui penjualan ikan-ikan kepada pihak swasta merupakan proses dari terjadinya administrasi publik yang demokratis. Adanya keterlibatan aktif dari pihak Pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa adanya proses sinergitas yang terjalin antara *Stakeholders Governance*. Dengan adanya sinergitas tersebut, kemudian menghasilkan banyak pilihan-pilihan suatu kebijakan yang dapat dilakukan oleh masing-masing *Stakeholders* untuk dapat mencapai tujuan bersama yaitu pengelolaan pelayanan publik. sehingga peran *Governance* tidak sepenuhnya mendominasi dalam melayani masyarakat khususnya pengelolaan pelayanan publik pada kelompok budidaya ikan lele.

Penjelasan mengenai peran dari masing-masing *Stakeholders* dalam sinergitas terhadap pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Peran *Stakeholders* dalam sinergitas Pengelolaan Pelayanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Stakeholders	Peran
<i>Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan bantuan kepada kelompok budidaya ikan lele dalam bentuk benih ikan lele, kolam, dan pakan b. Memberikan sosialisasi dan menjadi mediator bagi masyarakat budidaya ikan lele c. Memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai budidaya ikan lele kepada masyarakat
<i>Civil society</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan musyawarah bersama masyarakat untuk pembentukan kelompok budidaya ikan lele b. Memberikan iuran setiap satu bulan sekali sebesar Rp 50.000 untuk dana operasional kelompok budidaya ikan lele c. Menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas untuk dikelola oleh kelompok budidaya ikan lele d. Ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan kelompok budidaya ikan lele
<i>Private sector</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga siklus kehidupan di kelompok budidaya ikan lele dengan cara membeli ikan-ikan lele yang dijual oleh pihak kelompok budidaya ikan lele

Sumber: Data Hasil Penelitian

Pada Tabel 20. Menjelaskan mengenai peran *Stakeholders* dalam sinergitas pengelolaan pelayanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, dimana pihak *Governance* memberikan dukungan berupa bimbingan, arahan, dan bantuan-bantuan sarana dan prasarana kepada pihak masyarakat, sedangkan pihak masyarakat memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh pihak Pemerintah yaitu berupa pengelolaan budidaya ikan lele untuk menghasilkan ikan-ikan lele yang berkualitas sinergitas yang terjalin antara pihak *Civil society* dengan Pemerintah adalah peran dari pihak *Civil society* adalah menghasilkan ikan-ikan yang kualitas dan membayar kas untuk dana operasional budidaya ikan lele, sedangkan pihak Pemerintah memberikan pelayanan pengelolaan dalam budidaya ikan lele. Sinergitas yang terjalin antara pihak *Private sector* dengan pihak masyarakat berupa peran dari pihak masyarakat adalah menjual ikan-ikan yang berkualitas. Sedangkan peran *Private sector* adalah melakukan bisnis dengan pihak masyarakat dengan cara membeli ikan-ikan lele.

Cara budidaya yang baik menurut Suryantoro (2012), yaitu suatu program dari pemerintah guna memperbaiki kualitas produk perikanan budidaya supaya produk tersebut dapat bersaing secara internasional. CBIB merupakan cara budidaya ikan dalam lingkungan yang terkontrol sehingga dapat memberikan jaminan keamanan pangan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, bahan kimia serta bahan biologi.

CBIB yaitu jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, yang dapat dilakukan oleh badan usaha, kelompok, dan perorangan. Pelaksanaannya diterapkan pada usaha produsen primer (pembudidaya ikan), pengolah, dan pemasaran hasil perikanan. Penerapan keamanan pangan hasil perikanan terdiri dari penggunaan pakan, obat ikan, pupuk, probiotik, dan bahan kimia lain.

a. Keamanan pangan

Tujuan CBIB adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk hasil perikanan yang sesuai dengan persyaratan pasar global yaitu menuntut adanya penyediaan bahan baku yang memiliki mutu tinggi dan memenuhi kesehatan.

Persyaratan mutu produk meliputi bebas residu hayati, bahan kimia, logam berat, pestisida akan dapat dipenuhi apabila pengawas mutu terus dilakukan. Pengawasan mutu harus dilakukan mulai dari proses produksi budidaya, pemberian pakan dan obat-obatan, penanganan pasca panen, pengolahan, sampai pada pemasaran ke tangan konsumen.

Penerapan keamanan pangan atau HACCP perlu di identifikasikan dalam proses produksi, prinsip tersebut ada 7 yaitu:

1. Analisis potensi hazard

Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keamanan pangan (*food safety*), terdiri dari aspek produk yang berkaitan dengan keamanan pangan mulai dari prapanen sampai pascapanen hingga ke konsumen, terdiri dari:
 - 1) Biologi (bakteri, virus, protozoa)
 - 2) Kimia (bahan kimia alami/racun, bahan tambahan/pengawet, bahan cemaran)
 - 3) Fisik (kaca, logam, kayu, plastik)
 - b. Kelayakan keutuhan produk, karakteristik atau proses yang dapat menyebabkan produk tidak sesuai dengan standar.
2. Menentukan titik kendali kritis
CCP (*Critical Control Point*) merupakan tahapan atau waktu apabila gagal dalam melakukan pengawasan/ pengendalian akan menyebabkan risiko/kerugian bagi konsumen. Penentuan CCP merupakan upaya untuk menentukan tahapan tertentu dalam proses produksi untuk menentukan jaminan mutu produk.
 3. Menetapkan batasan kritis
CL (*Critical Limit*) yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh CCP. Batas kritis meliputi persyaratan teknis, batasan penolakan dan toleransi penolakan. Batas kritis maksudnya adalah suatu batas yang masih bisa ditoleransi secara mikrobiologis.
 4. Membentuk sistem pemantauan pengendalian CCP
Ditetapkan apa saja yang perlu dipantau, cara memantau, waktu dan frekuensi, siapa yang memantau, dan dimana dipantau. Pemantauan dilakukan secara periodik, khusus ditempat CCP yang sangat mempengaruhi keamanan pangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan jaminan mutu bahan pangan yang diproduksi sehingga tidak menimbulkan keracunan makanan.

5. Menetapkan tindakan perbaikan

Apabila hasil pemantauan CCP melampaui batas kritis maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan yang dilakukan harus dapat menghilangkan potensi bahaya. Prosedur dan program tindakan perbaikan dibutuhkan mulai awal sampai akhir.

6. Dokumentasi prosedur

Semua yang dipantau harus dicatat menggunakan formulir standar yang disebut SOP (*Standart Operational Prosedure*) yang terdiri dari uraian singkat dan jelas mengenai tujuan dan prosedur untuk setiap tahapan kegiatan.

7. Prosedur verifikasi

Untuk memastikan bahwa program HACCP dilakukan sudah sesuai, audit dilakukan terhadap semua tahap. Verifikasi alangkah baiknya dilakukan setiap hari. Hasil akhir verifikasi berupa laporan bahwa HACCP telah dilaksanakan dengan baik atau berupa tindak lanjut perbaikan atas kekurangan yang ditemukan.

Cara penerapan CBIB

Penerapan CBIB pembudidaya perlu memahami ketentuan yang disyaratkan sehingga dapat melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan usaha budidaya dengan menggunakan daftar isian CBIB seperti dalam petunjuk teknis .

1. Dokumen kelengkapan

Dokumen kelengkapan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh usaha budidaya dalam menerapkan CBIB antara lain:

- a. SOP (*Standart Operational Prosedure*) merupakan prosedur yang harus digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan usaha budidaya
- b. Catatan/ rekaman, sebagai bukti tertulis bahwa kegiatan usaha budidaya yang dilakukan sesuai SOP.

Penyimpanan catatan/ rekaman harus dilakukan dengan baik supaya sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penelusuran ulang.

Catatan/rekaman tersebut berisi tentang:

- a. Benih (asal, jumlah, kondisi, bebas penyakit dll)
- b. Pakan yang sudah terdaftar di DJPB (nomor registrasi, asal, jumlah, kondisi, dll)
- c. Obat-obatan, bahan kimia dan bahan biologis yang terdaftar di DJPB (nomor registrasi, asal distributor, jumlah, jenis, dll)
- d. Hasil produksi (jumlah, kondisi, pembeli, dll)
- e. Data umum
- f. Data produksi per siklus
- g. Lain-lain catatan yang dianggap perlu pada unit usaha budidaya.

Kelompok pembudidaya ikan lele Desa Coper secara umum sudah menerapkan cara budidaya dengan baik dan benar. Yaitu dibuktikan dengan kondisi benih yang didapatkan dari daerah Tulungagung sehat bebas dari penyakit, pakan dan obat-obatan yang digunakan sudah terdaftar DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan), pemberian pakan secara teratur, dan dilakukan cek kolam rutin setiap harinya.

Budidaya lele menggunakan metode NWS (*Natural Water System*) merupakan konsep budidaya yang mengacu pada ketimbangan ekosistem perairan. Jadi keseimbangan ekosistem air di kolam budidaya ikan lele bisa

dijaga parameter kualitas airnya seperti suhu pada kisaran 22°-32°C, pH netral antara 6-8, oksigen terlarut lebih dari 1ppm. Metode NWS sangat efisien dalam pemberian pakan yaitu dapat ditekan 0,7 dari angka normal dengan perbandingan 1:1,1 artinya memerlukan 1,1 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg ikan lele. Syarat kedalaman kolam lebih dari 1m dengan saluran pembuangan berada di tengah (Kurniawan, 2015)

Pada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yang perlu dilakukan dalam pengelolaan budidaya ikan lele menggunakan metode NWS (*Natural Water System*) yaitu persiapan air pada kolam dengan kepadatan 100-400 ekor/m³, disiapkan dedak sebanyak 30 g/m³, ragi tape atau tempe 1 sdm/m³, ditambahkan air secukupnya, kemudian ditutup rapat untuk difermentasikan selama 3 hari. Hari pertama dimasukkan 40 cm air di kolam, ditebarkan dolomit atau kapur sebanyak 200-300 g/m³, probiotik sebanyak 30-40 ml/m³, ditambahkan fermentasi dedak yang sudah disaring dan molase 20-30 g/m³. Hari keempat ketinggian air dinaikkan menjadi 80-100 cm, dimasukkan dolomit sebanyak 30-50 g/m³ dan probiotik sebanyak 10-15 ml/m³. Hari ketujuh benih lele siap ditebar.

Pakan diberikan sebanyak 5% ketika ikan lele berumur 3-15 hari, pakan berkurang menjadi 1,5% bobot tubuh ikan lele ketika berumur 60 hari. Setiap 1 kg pakan harus ditambahkan probiotik sebanyak 10 ml dan di dicampur dengan tetes tebu. Kemudian di diamkan selama 5-10 menit sebelum diberikan ke ikan lele. Pergantian air dilakukan setiap tujuh hari sekali sebanyak 30 cm. Penambahan air diikuti pemberian probiotik sebanyak 5 ml/m³ dan dolomit sebanyak 30-50 g/m³. Selain itu perlu dilakukan puasa pada ikan lele selama 24 jam ketika pergantian air.

4.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori *Good Governance* pada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Keberhasilan yang diraih akibat sinergitas *stakeholders Good Governance* dalam mewujudkan administrasi publik yang demokratis melalui pengelolaan pelayanan publik secara terpadu di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo terlihat dalam mewujudkan administrasi publik yang demokratis melalui pengelolaan pelayanan publik, faktor-faktor pendukung sinergitas dan faktor-faktor penghambat sinergitas adalah sebagai berikut:

4.6.2.1 Faktor Pendukung Sinergitas

- a. Dukungan Pemerintah melalui Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada Masyarakat Kelompok Budidaya Ikan Lele

Dukungan Pemerintah melalui Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat kelompok budidaya ikan lele menjadi salah satu faktor yang mendukung terjalannya sinergitas *Stakeholders*. Hal ini terlihat pada keterlibatan Pemerintah dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk dapat mengatasi masalah pengelolaan pelayanan publik yang ada di masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper Kabupaten Ponorogo. Sehingga menghasilkan sebuah kebijakan bersama untuk mengelola pelayanan publik dengan membangun kelompok budidaya ikan lele.

Pemerintah juga berperan dalam memberikan bantuan berupa sumbangan fasilitas-fasilitas yang menunjang pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan. Yaitu masyarakat mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa kolam sebanyak 8 buah, pakan sebanyak 24 sak (setiap satu kolam mendapatkan 4 sak), benih ikan lele sebanyak 1.500

ekor, dan panduan proses budidaya ikan lele. Bantuan diberikan secara berkala 3-7 hari. Bahkan secara tidak langsung Pemerintah juga menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Nawawi J (2007), sistem pemerintahan yang demokratis yaitu menekankan kesetaraan antara lembaga negara baik pusat daerah, swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah mencakup semua bentuk mekanisme, proses dan lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

b. Peran Aktif Masyarakat Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper

Faktor pendukung berikutnya dalam mempengaruhi terjalannya sinergitas antara *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik sehingga menciptakan sebuah administrasi yang demokratis adalah peran aktif dari masyarakat kelompok budidaya ikan lele.

Peran aktif masyarakat kelompok budidaya ikan lele terlihat dari kekompakan yang terbentuk untuk mengatasi masalah budidaya ikan lele melalui musyawarah dengan membentuk kelompok budidaya ikan lele untuk mengelola serta menguatkan usaha budidaya ikan lele, saling berbagi cerita dan mencari solusi permasalahan yang ada supaya menghasilkan ikan-ikan lele yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang lebih. Hal ini sejalan dengan Arolita *et.al.*, (2008), bahwasanya kemandirian pada pembudidaya untuk usaha budidaya ikan terdiri dari tingkat kemandirian dalam proses budidaya ikan yang baik dan benar, tingkat kemandirian dalam pengelolaan modal dan keuangan, dan tingkat kemandirian dalam pemasaran hasil budidaya ikan.

Musyawarah yang telah disepakati menghasilkan kesepakatan yaitu untuk mengelola pelayanan dalam budidaya ikan lele dengan membentuk kelompok budidaya ikan lele. Fungsi kelompok budidaya ikan lele sebagai organisasi yang mewakili masyarakat untuk dapat mengelola pelayanan yang telah diberikan oleh

Bidang Perikanan, Dinas Pertanian untuk budidaya ikan lele dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan dalam budidaya ikan lele. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi sosial yang baik bagi masyarakat dan sekitarnya. Terbentuknya kelompok budidaya ikan lele berpengaruh baik untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang ada, bahkan keberadaannya juga sebagai sarana untuk saling berkomunikasi antar anggota masyarakat. Menurut Mursitama T.N (2012), peran masyarakat tidak hanya sebagai pengawas dari luar birokrasi yang ada. Namun masyarakat dapat melakukan penguatan peran kelembagaan lainnya. Maka dari itu penguatan peran masyarakat penting kaena sebagai *stakeholders* sekaligus penerima manfaat pelayanan.

c. Keterkaitan Pihak Swasta dalam Berbisnis dengan Kelompok Budidaya Ikan Lele

Faktor pendukung yang berikutnya dalam mempengaruhi terjalannya sinergitas antara *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian sehingga menciptakan sebuah administrasi yang demokratis dalam perspektif *Governance* adalah keterlibatan pihak swasta dalam berbisnis dengan pihak masyarakat yaitu kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Sebagai pihak yang pada umumnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun peran swasta sebagai *Stakeholders* sangat penting untuk menciptakan sebuah *Good Governance*.

Keberadaan pihak swasta dalam pengelolaan pelayanan publik di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan ketika pihak swasta yang berjumlah 15 orang yang diketuai oleh Ibu Harni mencoba untuk berbisnis dengan pihak kelompok budidaya ikan lele. Yaitu pihak swasta selalu membeli ikan-ikan lele yang ada di kelompon budidaya ikan lele Desa Coper.

Secara tidak langsung pihak swasta juga ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Ponorogo. Peran dari pihak swasta adalah menciptakan

lapangan kerja, menjalankan industri, dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Menurut Mursitama T.N (2012), peran swasta yaitu sebagai penggerak dari dinamika perekonomian suatu bangsa. Pertama berkontribusi berjalannya sistem pelayanan publik yang profesional, cepat, efisien, dan biaya rendah. Kedua berpotensi menghambat terwujudnya sistem transparansi nasional, misalnya karena ingin cepat mendapatkan izin usaha memberikan iming-iming hadiah pada pihak birokrat. Namun pada usaha kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubong selalu membantu pihak masyarakat dalam menjalankan pelayanan yang ada.

4.6.2.2 Faktor Penghambat Sinergitas

- a. Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Pelayanan budidaya ikan lele
- Faktor yang menghambat terjalannya sinergitas antara *stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan yang ada di kelompok budidaya ikan lele yaitu dari masyarakat sendiri. Yaitu kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai cara budidaya menggunakan kolam diatas tanah atau sistem kolam diatas tanah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abulias M.N *et.al.*, (2014), teknologi bioflok merupakan sistem budidaya bakteri heterotrof dan alga dalam suatu gumpala *flocs* secara terkontrol pada suatu wadah budidaya dengan mengontrol kualitas air mentransformasikan amonium menjadi protein mikrobial yang mengurangi residu dari sisa pakan. Manfaat budidaya sistem kolam diatas tanah yaitu untuk meminimalisir pergantian air atau bahkan tidak ada pergantian air sehingga teknologi ini ramah lingkungan. kondisi masyarakat yang pendidikannya masih rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai sistem budidaya ikan dengan kolam diatas tanah. Menurut Basrowi dan Siti J (2010), pendidikan merupakan usaha sadar dalam menyumbangkan kemampuan usaha manusia dalam rangka memajukan aktivitas. Yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang berbagai kegiatan.

Masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung mempunyai pendidikan yang rendah pula. Masyarakat masih kurang memahami pentingnya pendidikan. Perlu adanya bimbingan atau sosialisasi dari pihak pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper mengenai cara budidaya lele dengan sistem kolam diatas tanah kepada masyarakat. Selain memberikan sosialisasi, pihak Pemerintah beserta pihak masyarakat kelompok budidaya ikan lele juga memberikan pelatihan untuk mengelola budidaya ikan lele menggunakan kolam diatas tanah kepada masyarakat.

Pihak Pemerintah yaitu melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo mendukung usaha budidaya ikan lele. Bahkan dari pihak Pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan salah satunya sosialisasi dan pelatihan cara budidaya ikan lele yang baik. Namun bantuan tersebut hanya dikasihikan diawalnya saja, setelah itu pihak masyarakat akan belajar sendiri tanpa ada yang memandu. Alangkah baiknya setiap 3 bulan sekali dari pihak pemerintah memberikan pemantauan kepada masyarakat mengenai keberlanjutan operasional budidaya ikan lele tersebut.

- b. Terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan dan anggaran untuk mengelola 21 Kecamatan dalam pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Berbagai kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo untuk menjalin sinergitas, masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya adalah terbatasnya pegawai untuk menkoordinasi 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo dari 130 pembudidaya ikan dan terbatasnya anggaran dana untuk proses keberlangsungan usaha perikanan sehingga Kelompok budidaya ikan lele Desa

Coper hanya dibimbing dan diberikan bantuan diawal saja. Untuk pemantauan dari pihak Pemerintah setelah diberikan bantuan masih kurang . Menurut Saputra B (2015), dalam peningkatan kinerja pegawai meliputi tiga indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas. Namun, masih ada usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, salah satunya dengan memaksimalkan kinerja penyuluh perikanan dan petugas teknis serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk menunjang usaha perikanan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Mengembangkan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara totalitas, maka upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Seorang pemimpin harus benar-benar memotivasi bawahannya yaitu karyawan supaya dapat melaksanakan tugasnya lebih baik. Menurut Rumbiati (2016), rendahnya prestasi kerja karyawan juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang disediakan dalam instansi untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu lingkungan kerja fisik yang kurang mendukung produktivitas kerja. Menurunnya kinerja disebabkan tidak meratanya beban kerja yang diberikan dari pimpinan.

Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang dikenal memiliki lahan pertanian yang tinggi, tentunya akan berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai yang bekerja di pemerintahan daerah. Dapat dibuktikan dengan adanya standar gaji yang diterima pegawai lingkup pemerintahan selain bidang pertanian, yaitu perikanan dan kelautan, peternakan besarnya gaji yang diterima tidak relevan dengan pendapatan dan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Pada kenyataannya gaji yang diterima pegawai pada Bidang Perikanan masih relatif rendah dibandingkan tugas yang diemban. Begitu juga penghargaan yang minim menjadikan pegawai kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaannya.

Perlunya kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan seseorang untuk dapat menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun pengaruhnya aktualisasi diri bagi prestasi kinerja pegawai Bidang Perikanan antara lain prestasi kerja pegawai diawali dari bagaimana pemerintah Kabupaten Ponorogo memperlakukan pegawainya dengan memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan untuk mengaktualisasikan dirinya. Maka dari itu pegawai Bidang Perikanan akan merasa dihargai dan didukung dalam bekerja.



4.7 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain dapat dilihat pada Tabel. 21

Tabel 21. Implikasi Penelitian

No	Informasi	Kesimpulan	Pra proposisi	Proposisi
1	Kondisi masyarakat kabupaten Ponorogo sebelum adanya bidang perikanan, Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Ponorogo	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya kondisi masyarakat Kabupaten Ponorogo sebelum adanya Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo masih belum baik. Masyarakat masih kurang informasi dalam bidang perikanan sehingga masyarakat kurang aktif dalam pengelolaan pelayanan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo mengakibatkan banyaknya pengangguran yang dialami masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum baik 2. Masyarakat kurang informasi 3. Masyarakat kurang aktif 4. Banyaknya pengangguran yang dialami masyarakat 	Kondisi masyarakat kabupaten Ponorogo sebelum ada Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> belum terpenuhi yaitu belum baik, masih kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.
2	Kondisi pengelolaan pelayanan pada dinas pertanian dan perikanan kabupaten ponorogo sekarang	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya kondisi pengelolaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan berjenjang. Bantuan-bantuan semakin banyak dan informasi yang diberikan selalu tepat waktu sehingga masyarakat bisa turut aktif dalam program-program yang dilaksanakan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. meskipun terdapat beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sebanyak 30 kelompok dari 130 kelompok pembudidaya ikan. Hal ini disebabkan karena kelompok masih belum layak mendapatkan bantuan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan dengan baik dan berjenjang 2. Masyarakat aktif mengikuti program-program 3. Informasi yang diberikan tepat waktu 4. Beberapa masyarakat belum mendapat bantuan 5. Belum layak mendapatkan bantuan 	Kondisi pengelolaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sekarang yakni berjalan dengan baik dan berjenjang, serta informasi yang diberikan selalu tepat waktu. Hal ini menunjukkan prinsip <i>good governance</i> yaitu efisien dan efektifitas.
3	Hambatan-hambatan yang dihadapi dinas pertanian dan perikanan kabupaten ponorogo dalam pengelolaan pelayanan publik	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo setiap <i>stakeholders</i> berbeda. Hambatan dari Pemerintah yaitu karena terbatasnya pegawai yang ada sehingga sulit untuk mengelola 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, serta terbatasnya anggaran untuk mendukung usaha perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya pegawai 2. Terbatasnya anggaran 	Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan pelayanan publik adalah terbatasnya pegawai dan anggaran.

Lanjutan Tabel 21. Implikasi Penelitian

No	Informasi	Kesimpulan	Pra proposisi	Proposisi
4	Awal mula berdirinya kelompok pembudidaya ikan lele desa coper	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya awal mula berdirinya kelompok budidaya ikan lele Desa Coper adalah mereka yang sudah memiliki usaha budidaya sendiri. Untuk menguatkan usahanya maka perlu adanya orang yang bisa membantu baik dalam hal permodalan atau konsultasi. Akhirnya dikomunikasikan dengan teman-teman dan di hadiri pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan membentuk kelompok budidaya ikan lele Desa Coper sekaligus mengikuti program dari Dinas yaitu budidaya ikan lele Ponorogo 2016. Namun perlu diketahui bahwasanya apabila usaha budidaya hanya milik perseorangan tidak bisa untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan, melainkan harus atas dasar kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki usaha budidaya sendiri 2. Perlu bantuan permodalan dan konsultasi 3. Membentuk kelompok budidaya ikan lele 	Awal mula berdirinya kelompok pembudidaya ikan lele desa coper adalah memerlukan bantuan permodalan dan konsultasi. Sehingga dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, dan terjalin sinergitas antar <i>Stakeholders</i> .
5	Bantuan yang diberikan kepada kelompok budidaya ikan lele desa coper	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper yaitu sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan lele, 8 kolam intensif, 4 sak pakan, dan 1.500 benih ikan lele yang diberikan secara bertahap. Kemudian ikan-ikan lele dikelola dengan baik supaya menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap melalui APBD dan APBN yang diketahui oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan sosialisasi dan pelatihan budidaya ikan lele, 8 kolam intensif, 4 sak pakan, dan 1.500 benih ikan lele yang diberikan secara bertahap 	Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo kepada kelompok budidaya ikan lele desa coper adalah pelatihan budidaya, 8 kolam intensif, 4 sak pakan, dan 1.500 benih ikan lele. Sehingga terjalin sinergitas antar <i>Stakeholders</i>
6	Peran kelompok budidaya ikan lele desa coper dalam pengelolaan pelayanan publik di kabupaten ponorogo	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya peran masyarakat yaitu menghasilkan ikan lele yang berkualitas, membayar kas setiap bulan yaitu sebesar Rp 50.000,- digunakan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya, serta pembentukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yang dilaksanakan dengan musyawarah bersama masyarakat, kepala desa Coper dan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan ikan lele yang berkualitas 2. Membayar kas setiap bulan sebesar Rp 50.000,- 3. Pembentukan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper dengan musyawarah 	Peran kelompok budidaya ikan lele desa coper adalah menghasilkan ikan lele, membayar kas, dan pembentukan kelompok budidaya dengan musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya proses demokrasi.

Lanjutan Tabel 21. Implikasi Penelitian

No	Informasi	Kesimpulan	Pra proposisi	Proposisi
7	Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok budidaya ikan lele desa coper dalam pengelolaan pelayanan publik di kabupaten ponorogo	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo dari Masyarakat adalah sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui tehnik budidaya menggunakan sistem kolam diatas tanah. Dan akhirnya mereka belajar sendiri.	1. Sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah	Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok budidaya ikan lele desa coper yaitu sebagian masyarakat belum paham budidaya sistem kolam diatas tanah.
8	Peran kelompok pengolah ikan "wanita mulya" watubonang dalam pengelolaan pelayanan publik di kabupaten ponorogo	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya peran swasta (kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang yaitu bermitra melakukan bisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk membeli ikan-ikan lele yang digunakan untuk membuat produk olahan dari ikan lele berupa kerupuk ikan.	1. Berbisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. 2. Membuat produk olahan dari ikan lele berupa kerupuk ikan	Peran kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang adalah bisnis dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.
9	Dukungan dari pemerintah terbentuknya sinergitas antara <i>stakeholders</i>	Dari uraian tersebut dijelaskan bahwasanya dukungan dari Pemerintah sehingga terbentuknya sinergitas antara <i>stakeholders</i> dibuktikan dengan Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan bantuan sarana dan prasana, serta outlet pemasaran kepada masyarakat dan swasta. Masyarakat mengelola bantuan yang diberikan dari Dinas dengan baik sehingga menghasilkan ikan yang berkualitas yang akan dijual ke pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang. Pihak swasta menjadi pelanggan membeli ikan lele pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Namun perlu diketahui pihak pemerintah kurang dalam pemantauan perkembangan pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.	1. memberikan bantuan sarana dan prasana 2. Memberikan outlet pemasaran kepada masyarakat dan swasta 3. Kurang pemantauan pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper.	Dukungan dari pemerintah terbentuknya sinergitas antara <i>stakeholders</i> adalah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya kepada Pemerintah. Hal ini memenuhi prinsip <i>good governance</i> yaitu partisipasi.
10	Peran aktif kelompok budidaya ikan lele desa coper	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya Peran aktif masyarakat yaitu menghasilkan ikan lele yang berkualitas. Selain itu juga membayar kas setiap bulan dengan besaran yang sama yaitu Rp 50.000,- yang digunakan untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya.	1. Menghasilkan ikan lele 2. Membayar kas setiap bulan sebesar Rp 50.000,-	Peran aktif kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yaitu membayar kas Rp 50.000,-/orang dalam 1 bulan, hal ini menunjukkan adanya prinsip <i>good governance</i> yaitu partisipasi.

Lanjutan Tabel 21. Implikasi Penelitian

No	Informasi	Kesimpulan	Pra proposisi	Proposisi
11	Keterkaitan pihak swasta kelompok pengolah ikan "wanita mulya" watubonang dalam pendanaan operasional pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya dengan adanya keterkaitan pihak swasta (kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang dalam pendanaan operasional pengelolaan pelayanan yaitu bermitra melakukan bisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper untuk membeli ikan-ikan lele yang digunakan dalam proses pembuatan produk olahan dari ikan lele berupa kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele.	<ol style="list-style-type: none"> Berbisnis dengan masyarakat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper Menghasilkan produk kerupuk ikan dan stik yang terbuat dari kepala ikan lele. 	Keterkaitan pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" watubonang dalam pendanaan operasional yaitu bisnis dengan kelompok budidaya ikan lele Desa Coper. Sehingga terjalin sinergitas antar <i>Stakeholders</i> .
12	Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele desa coper	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan dari Masyarakat adalah sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah. Dan akhirnya mereka belajar sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> Sebagian masyarakat belum terlalu paham budidaya sistem kolam diatas tanah 	Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele Desa Coper yaitu sebagian masyarakat belum paham budidaya sistem kolam diatas tanah
13	Terbatasnya petugas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian Dan Perikanan dan anggaran untuk mengelola 21 kecamatan dalam pelaku usaha perikanan yang ada di kabupaten ponorogo	Dari uraian tersebut diketahui bahwasanya hambatan-hambatan dari Pemerintah yaitu karena terbatasnya pegawai yang ada sehingga sulit untuk mengelola 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, serta terbatasnya anggaran untuk mendukung usaha perikanan. Selain itu kelompok budidaya ikan lele Desa Coper hanya dibimbing diawal saja. Untuk pemantauan dari pihak Pemerintah setelah diberikan bantuan masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya pegawai Terbatasnya anggaran Kurangnya pemantauan 	Hambatan-hambatan dari Pemerintah yaitu terbatasnya pegawai dan anggaran.

4. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sinergitas *Stakeholders* dalam pengelolaan pelayanan publik yang demokratis dalam perspektif teori *Good Governance* pada Dinas Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo serta berbagai penjelasan berdasarkan hasil kondisi yang terjadi di tempat penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses terjalannya sinergitas *Stakeholders* diawali dari adanya proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan lele Desa Coper, kepala desa dan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yaitu membuat kelompok budidaya ikan lele Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Proses musyawarah ini menunjukkan adanya suatu demokrasi pada masyarakat. Keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan proses terjalannya sinergitas *Stakeholders*. Adanya bisnis publik yang terjadi pada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper yaitu dengan menjual ikan-ikan lele kepada pihak swasta kelompok pengolah ikan "Wanita Mulya" Watubonang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas ada dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung sinergitas adalah (1) dukungan dari Pemerintah berupa kebijakan, bimbingan, sarana dan prasarana kepada kelompok budidaya ikan lele Desa Coper (2) peran aktif dari masyarakat kelompok budidaya ikan lele desa Coper berupa partisipasi ketika musyawarah pembentukan kelompok budidaya ikan lele, partisipasi dalam mengelola pelayanan publik yang diberikan kepada kelompok budidaya ikan lele, membayar kas dan menghasilkan ikan-ikan lele yang

berkualitas. (3) keterlibatan teman dari kelompok pengolah ikan “Wanita Mulya” dalam membeli ikan-ikan lele. Faktor penghambat sinergitas *Stakeholders* adalah (1) perilaku masyarakat sendiri terhadap pengelolaan pelayanan budidaya ikan lele yaitu kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai cara budidaya menggunakan kolam diatas tanah atau sistem kolam diatas tanah (2) terbatasnya pegawai dan anggaran dana untuk proses keberlangsungan usaha perikanan, selain itu kurangnya pemantauan lebih lanjut dari pihak pemerintah kepada masyarakat kelompok budidaya ikan lele.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan proaktif melalui penggunaan pelayanan publik dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
2. Diharapkan bagi Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo lebih meningkatkan kinerjanya yang baik untuk menerapkan nilai *Good Governance* yaitu akuntabilitas berupa tanggung jawab pemantauan perkembangan pada masyarakat budidaya ikan lele Desa Coper.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulias M.N., DR. Utarini, ET winarni. 2014. Manajemen Kualitas Media Pendereran Lele pada Lahan Terbatas dengan Teknik Bioflok. Jurnal MIPA. Vol 37 (1). Purwokerto.
- Akbar F.R, 2015. Model Supervisi Artikistik – *Religious Humanistic* Kepala Mts Al Kautsar Sidang Iso Mukti Kec. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.3, No.1.
- Alamudi, Abdullah. 1991. Apakah Demokrasi Itu?. USIA. Jakarta.
- Aprolita, Siti A., Djoko S. 2008. Kemandirian Pembudidaya Ikan Patin di Lahan Gambut di Desa Tangkit Baru, Kec. Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Jurnal Penyuluhan. Vol 4 (2). Jambi.
- Arief Rahman. 2009. The Analysis Of Company Characteristic Influence Toward CSR Disclosure: Empirical Evidence Of Manufacturing Companies Listed In JSX. Jurnal JAAI. Volume 12 No 1, Juni 2008: 25-35. Universitas Islam Indonesia
- Arikunto. 1997. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta
- Asyhari M. 2015. Sinergitas *Stakeholders* Dalam Program Malang *Green, Clean, And Save* Dalam Perpektif *Good Governance*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015. No 39/08/Th.XIX, 5 Agustus.
- Baktiar C, A. Wibowo, Dan R. Adipranata. 2014. Pembuatan Sistem Peramalan Penjualan Dengan Metode Weighted Moving Average Dan Double Exponential Smoothing Pada UD Y. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Basrowi dan Siti J. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol 7 (1). Lampung.
- Devers K dan Richard M. 2000. *Study Design in Qualitative Research-2: Sampling and Data Collection Strategies*. Education for Health. Vol. 13 (2). USA.
- Effendi. 2005. Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama. Yogyakarta.
- Egels Niklas. 2004. *Reframing Instrumental Stakeholders Theory*. Oikos: Foundation for Economy and Ecology. Sweden.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. PT. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

- Hasan I. 2002. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hikam, Muhammad AS. 2015. *Demokrasi dan Civil Society*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Huse Morten. 2005. *Corporate Governance: Understanding Important Contingencies. Corporate Ownership and Control*. Vol. 2 (4). Italy.
- Jasuli Affan. 2004. Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas dengan PT. Nusafarm terhadap Pendapatan Usaha Tani Kapas di Kabupaten Situbondo. Skripsi. Universitas Jember.
- Kartikaningdyah. 2011. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada BP2T Kota Tanjungpinang. Batam .
- Krina. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan. Jakarta .
- Kurniawan Didik. 2015. Sistem Budidaya Lele. Universitas Brawijaya. Malang.
- Miles Dan Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. Aditya Media. Yogyakarta.
- Mursitama T.N. 2012. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 1 (1). Jakarta Barat
- Nawawi J. 2007. *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta.
- Pamudji. 1985. *Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Parasuraman, A., Berry, L.L., and Zeithaml, A.V. 1990. *Delivery Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectation*. New York: The Free Press Adivision of Macmillan, Inc.
- Partomo, Tiktik Sartika. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rahadian A.H. 2009. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia*.
- Rahmawati T, Iwan N, dan Ike W. 2004. Sinergitas *Stakeholders* Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vo.2, No. 4.

- Riniwati Harsuko. 2016. Manajemen Sumberdaya Manusia (Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM). UB Media. Universitas Brawijaya. Malang.
- Riva'i, 2010. Upaya Membangun Strategi Marketing Outcomes Berbasis Relationship Marketing Dan Power. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan. No.3. Semarang.
- Robert Charlick. 1994. *An Assessment of Politics and Governance in Madagascar*. Washington: ARD, Inc.
- Rosyada A.A. 2016. Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. e-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol 4(1). Samarinda.
- Rumbiati.2016. Pengaruh Aktualisasi Diri dan Penghargaan terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini. Vol.7 (01).
- Saparinto Cahyo. 2012. Panduan Lengkap Bisnis dan Budi Daya Lele Unggul. Lily Publisher. Yogyakarta.
- Saputra Beni. 2015. Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 4 (4). Pontianak.
- Siagian, Sondang P. 1986. Filsafat Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
- Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity To Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
- Supardan Dadang. 2015. Sejarah dan Prospek Demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. Vol 2 (2). Bandung.
- Suyanto, 2010. Indeks Demokrasi Indonesia 2010 Kebebasan Yang Bertanggungjawab Dan Substansial. BPS. Jakarta.
- Tantalo C and Richard L P. 2014. *Value Creation Trought Stakeholder Synergy. Strategic Management Journal.Italy*.
- Tricahya. 2016. Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Wulandari, 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme *CorporateGovernance* Terhadap Kinerja PerusahaanPublik Di Indonesia. Fokus Ekonomi. Vol.1, No.2.

Yenny. 2013. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.1, No. 2.



Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Gambar 9. Bidang Perikanan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo



Gambar 10. Kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang



Gambar 11. Olahan Kerupuk Ikan Lele dari Kelompok Pengolah Ikan "Wanita Mulya" Watubonang

Lanjutan Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Gambar 12. Kolam Diatas Tanah Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper



Gambar 13. Kelompok Budidaya Ikan Lele Desa Coper



Lampiran 2. Lembar Kuisisioner

KUISIONER PENELITIAN



Responden Yth,

Saya adalah mahasiswa program studi **Agrobisnis Perikanan Universitas Brawijaya Malang** yang sedang mengadakan penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiah (skripsi) tentang **Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Pelayanan Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Good Governance**.

Sehubungan dengan itu, saya memohon dengan hormat Bapak/Ibu bersedia untuk mengisi angket (kuesioner) penelitian ini. Semua data yang diterima bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis semata, bukan untuk dipublikasikan atau digunakan untuk kepentingan lainnya. Peran Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk skripsi saya.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : _____
- Jenis kelamin : Pria Wanita
- Usia : _____ tahun
- Pendidikan terakhir : _____
- Status Kerja : Tetap Kontrak
- Jabatan/Golongan : _____
- Masa kerja : _____ tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu diminta untuk memilih jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang bapak/ibu alami, dengan cara memberi tanda silang pada setiap baris pernyataan. Pada tiap baris pernyataan tersebut terdapat kolom-kolom jawaban dalam kategori yang menunjukkan tingkat persetujuan bapak/ibu terhadap pernyataan-pernyataan yang ada.



2. Demokrasi (Variabel X2)

No	Pernyataan	Kategori											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Aturan tertulis mengenai pelayanan menghambat kebebasan berpendapat oleh masyarakat												
2	Aturan tertulis mengenai pelayanan dari masyarakat menghambat kebebasan berpendapat oleh Dinas												
3	Aturan tertulis mengenai pelayanan bersifat diskriminasi terhadap kelompok lain												
4	Tindakan atau pernyataan dari Dinas mengenai pelayanan bersifat diskriminasi terhadap kelompok lain												

3. Governance (Variabel X3)

No	Pernyataan	Kategori											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kinerja pegawai Dinas semakin meningkat												
2	Kesenjangan antara Dinas dengan masyarakat berkurang												
3	Pegawai Dinas lebih profesional tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat												
4	Kepercayaan masyarakat terhadap Dinas semakin meningkat												
5	Masyarakat semakin paham mengenai kegiatan yang ada di Dinas												
6	Tersedianya informasi yang memadai setiap penyusunan dan implementasi pelayanan												
7	Akses informasi yang mudah didapat dan bebas diperoleh serta tepat waktu												
8	Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah semakin meningkat												
9	Masyarakat semakin peduli terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh Dinas												
10	Pelaksanaan pemberian pelayanan sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan												
12	Pembuatan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan												

4. Sinergitas Stakeholders (Variabel Y)

No	Pernyataan	Kategori										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Akses pasar menjadi lebih luas, organisasi bisa bekerjasama dalam skala yang luas											
2	Kerjasama antara Dinas dengan masyarakat dapat menekan biaya operasional											
3	Kerjasama antara Dinas dengan masyarakat menjadikan akses informasi dapat diperoleh dengan cepat											
4	Kerjasama antara Dinas dengan masyarakat dapat memperoleh omset lebih besar											
5	<i>Stakeholders</i> (Dinas, swasta, dan masyarakat) lebih peka terhadap perubahan dalam persaingan											
6	<i>Stakeholders</i> (Dinas, swasta, dan masyarakat) mampu membuat inovasi produk baru											
7	<i>Stakeholders</i> (Dinas, swasta, dan masyarakat) lebih dikenal banyak kalangan masyarakat											

